

SKRIPSI

PENGARUH IMPLEMENTASI SISTEM AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (SAKIP) TERHADAP PENERAPAN *GOOD GOVERNANCE* PADA BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH PROVINSI RIAU

*Disusun dan diajukan Sebagai Salah Satu Syarat untuk mendapatkan gelar
Sarjana Ekonomi Pada Fakultas Ekonomi Universitas Islam Riau*



Oleh:

**DIAH ARIATIN
NPM: 155310590**

**PROGRAM STUDI AKUNTANSI S1
FAKULTAS EKONOMI
UNIVERSITAS ISLAM RIAU
PEKANBARU
2021**

SKRIPSI

PENGARUH IMPLEMENTASI SISTEM AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (SAKIP) TERHADAP PENERAPAN *GOOD GOVERNANCE* PADA BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH PROVINSI RIAU

*Disusun dan diajukan Sebagai Salah Satu Syarat untuk mendapatkan gelar Sarjana
Ekonomi Pada Fakultas Ekonomi Universitas Islam Riau*



Oleh:

**DIAH ARIATIN
NPM: 155310590**

**PROGRAM STUDI AKUNTANSI S1
FAKULTAS EKONOMI
UNIVERSITAS ISLAM RIAU
PEKANBARU
2021**



UNIVERSITAS ISLAM RIAU
FAKULTAS EKONOMI

Jalan Kaharudin Nasution No. 113 Perhentian Marpoyan
Telp. (0761) 674674 Fax: (0761) 6748834 Pekanbaru 28284

LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI

Nama : Diah Ariatin
NPM : 155310590
Fakultas : Ekonomi
Jurusan : Akuntansi S1
Judul Skripsi : Pengaruh Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) terhadap Penerapan Good Governance Pada Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Riau

Disahkan Oleh:

PEMBIMBING

Firdaus AR, Dr, SE., M.Si. Ak., CA.

Mengetahui:

DEKAN

KETUA PRODI



Dr. Firdaus AR, M.Si., Ak., CA.

Dr. Hj. Siska, SE., M.Si., Ak., CA



UNIVERSITAS ISLAM RIAU

FAKULTAS EKONOMI

Jalan Kaharuddin Nasution No. 113 Perhentian Marpoyan Telp. (0761) 674681

Fax. (0761) 674834 PEKANBARU - 28284

NOTULENSI SEMINAR HASIL

Nama Mahasiwa : Diah Ariatin
NPM : 155310590
Fakultas : Ekonomi
Jurusan : Akuntansi S1
Judul Penelitian : Pengaruh Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) terhadap Penerapan *Good Governance* Pada Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Riau

Sidang dibuka oleh **Dr.Firdaus AR,SE.,M.Si.,Ak.,CA** dan mempersilahkan mahasiswa untuk mempersilahkan hasil penelitiannya, selama sepuluh menit dan selanjutnya diadakan sesi tanya jawab.

No	Saran Tim Penguji	Pemeriksaan	Keterangan	Tanda Tangan
1.	Alfurkaniati, SE.,M.Si.,Ak.,CA 1. Abstrak cetak miring dan 3 paragraf 2. Kriteria responden 3. Pembahasan R Square	Sudah diperbaiki Sudah diperbaiki Sudah diperbaiki	Terlihat dihalaman Terlihat dihalaman 32 Terlihat dihalaman 34	
2.	Dina Hidayat, SE.,M.Si.,Ak.,CA 1. Perbaiki tujuan teknis abstrak dan teknis daftar isi 2. Tujuan dan manfaat penelitian dipisah 3. Teknis kutipan dan nama pengarang dan model penelitian 4. Perbaiki sesuai panduan sampling	Sudah diperbaiki Sudah diperbaiki Sudah diperbaiki Sudah diperbaiki	Terlihat dihalaman Terlihat dihalaman 6 & 7 Terlihat dihalaman 9 & 23 Terlihat dihalaman 28	

5. Teknis gambar penomoran, typo, pembahasan gambaran umum responden untuk <i>good governance</i> kaitkan dengan laporan audit BPK	Sudah diperbaiki	Terlihat dihalaman 65	
6. Daftar Pustaka	Sudah diperbaiki		

Disetujui Oleh :

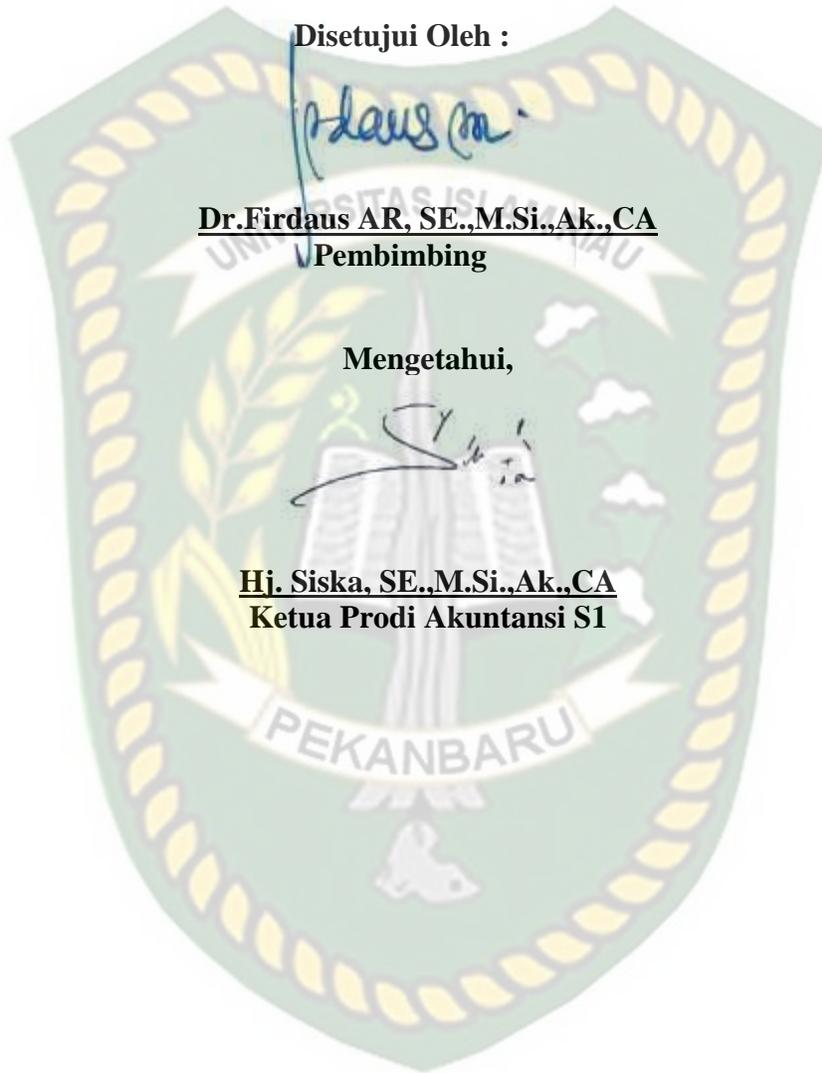


Dr.Firdaus AR, SE.,M.Si.,Ak.,CA
Pembimbing

Mengetahui,



Hj. Siska, SE.,M.Si.,Ak.,CA
Ketua Prodi Akuntansi S1





UNIVERSITAS ISLAM RIAU

FAKULTAS EKONOMI

Jalan Kaharuddin Nasution No. 113 Perhentian Marpoyan Telp. (0761) 674681

Fax. (0761) 674834 PEKANBARU - 28284

BERITA ACARA BIMBINGAN SKRIPSI

Telah dilaksanakan bimbingan skripsi terhadap:

Nama Mahasiswa : DIAH ARIATIN

NPM : 155310590

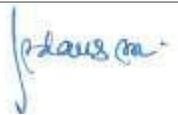
Fakultas : EKONOMI

Jurusan : AKUNTANSI S1

Sponsor : Dr. Firdaus AR, SE.,M.Si.,Ak.,CA

Judul Penelitian : Pengaruh Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) terhadap Penerapan *Good Governance* Pada Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Riau

No	Tanggal	Catatan	Berita Bimbingan	Paraf
		Sponsor		Sponsor
1.	24-10-2019		- Perbaiki Latar Belakang Masalah	
2.	11-11-2019		- Perbaiki Latar Belakang Masalah - Metode	
3.	16-12-2019		- Perbaiki Latar Belakang Masalah	
4.	03-02-2020		- ACC Seminar Proposal	
5.	19-10-2020		- Sistematika Penulisan - Perbaiki Populasi dan sampel	
6.	04-12-2020		- Penomoran Halaman - Cantumkan sumber kuesioner pada	

			operasional variable penelitian	
7.	21-12-2020		- ACC Seminar Hasil	

Pekanbaru, 22 Januari 2021

Pembantu Dekan 1



Dr. Elyan Sastraningsih, M.Si



UNIVERSITAS ISLAM RIAU

FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS

Alamat : Jalan Kaharuddin Nst Km 11 No 113 Marpoyan Pekanbaru Telp 647647

BERITA ACARA UJIAN SKRIPSI / MEJA HIJAU

Berdasarkan Surat Keputusan Dekan Fakultas Ekonomi Universitas Islam Riau No: 099/KPTS/FE-UIR/2021, Tanggal 19 Januari 2021, Maka pada Hari Rabu 20 Januari 2021 dilaksanakan Ujian Oral Komprehensif/Meja Hijau Program Sarjana Fakultas Ekonomi Universitas Islam Riau pada Program Studi **Akuntansi S1** Tahun Akademis 2020/2021

- | | |
|-------------------------|--|
| 1. Nama | : Diah Ariatin |
| 2. N P M | : 155310590 |
| 3. Program Studi | : Akuntansi S1 |
| 4. Judul skripsi | : Pengaruh Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) Terhadap Penerapan Good Governance Pada Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Riau. |
| 5. Tanggal ujian | : 20 Januari 2021 |
| 6. Waktu ujian | : 60 menit. |
| 7. Tempat ujian | : Ruang sidang meja hijau Fekon UIR |
| 8. Lulus Yudicium/Nilai | : Lulus (B) 69,25 |
| 9. Keterangan lain | : Aman dan lancar. |

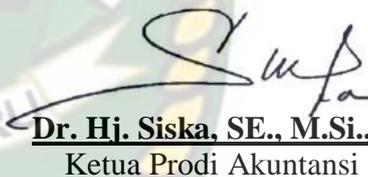
PANITIA UJIAN

Ketua



Dr. Hj. Ellyan Sastraningsih, SE., M.Si
Wakil Dekan Bidang Akademis

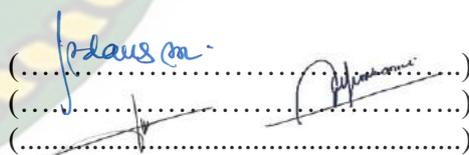
Sekretaris



Dr. Hj. Siska, SE., M.Si., Ak., CA
Ketua Prodi Akuntansi S1

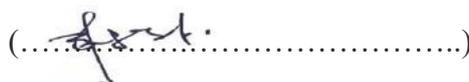
Dosen penguji :

1. Dr. Firdaus AR, SE., M.Si., Ak., CA
2. Hj. Alfurkaniati, SE., M.Si., Ak., CA
3. Dina Hidayat, SE., M.Si., Ak., CA



Notulen

1. Efi Susanti, SE., M.Acc



Pekanbaru, 20 Januari 2021

Mengetahui
Dekan,




Dr. Firdaus AR, SE., M.Si., Ak., CA

SURAT KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS EKONOMI UNIVERSITAS ISLAM RIAU
Nomor : 99/KPTS/FE-UIR/2021
TENTANG PENETAPAN DOSEN PENGUJI SKRIPSI MAHASISWA
FAKULTAS EKONOMI UNIVERSITAS ISLAM RIAU

DEKAN FAKULTAS EKONOMI UNIVERSITAS ISLAM RIAU

Menimbang : 1. Bahwa untuk menyelesaikan studi Program Sarjana Fakultas Ekonomi Universitas Islam Riau dilaksanakan ujian skripsi/oral komprehensif sebagai tugas akhir dan untuk itu perlu ditetapkan mahasiswa yang telah memenuhi syarat untuk ujian dimaksud serta dosen penguji
2. Bahwa penetapan mahasiswa yang memenuhi syarat dan penguji mahasiswa yang bersangkutan perlu ditetapkan dengan surat keputusan Dekan.

Mengingat : 1. Undang-undang RI Nomor: 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional
2. Undang-undang RI Nomor: 14 Tahun 2005 Tentang Guru dan Dosen
3. Undang-undang RI Nomor: 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi.
4. Peraturan Pemerintah RI Nomor: 4 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi
5. Statuta Universitas Islam Riau Tahun 2018.
6. SK. Pimpinan YLPI Daerah Riau Nomor: 006/Skep/YLPI/II/1976 Tentang Peraturan Dasar Universitas Islam Riau.
7. Surat Keputusan BAN PT Depdiknas RI :
a. Nomor : 2806/SK/BAN-PT/Akred/S/IX/2018, tentang Akreditasi Eko. Pembangun
b. Nomor : 2640/SK/BAN-PT/Akred/S/IX/2018, tentang Akreditasi Manajemen
c. Nomor : 2635/SK/BAN-PT/Akred/S/IX/2018, tentang Akreditasi Akuntansi S1
d. Nomor : 1036/SK/BAN-PT/Akred/Dipl-III/IV/2019, tentang Akreditasi D.3 Akuntansi.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : 1. Mahasiswa Fakultas Ekonomi Universitas Islam Riau yang tersebut di bawah ini:

N a m a : Diah Ariatin
N P M : 155310590
Program Studi : Akuntansi S1
Judul Skripsi : Pengaruh Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) terhadap Penerapan Good Governance Pada Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Riau.

2. Penguji ujian skripsi/oral komprehensif mahasiswa tersebut terdiri dari:

NO	Nama	Pangkat/Golongan	Bidang Diuji	Jabatan
1	Firdaus AR, Dr, SE., M.Si. Ak., CA.	Lektor Kepala, IV/a	Materi	Ketua
2			Sistematika	Sekretaris
3	Alfurkaniati, SE., M.Si., Ak., CA.	Lektor, C/c	Methodologi	Anggota
4	Dina Hidayat, SE.M.Si., Ak., CA.	Asisten Ahli, III/a	Penyajian	Anggota
5	-	-	Bahasa	Anggota
6	Efi Susanti, SE., M.Acc	Asisten Ahli, III/b	-	Notulen
7			-	Saksi II
8			-	Notulen

3. Laporan hasil ujian serta berita acara telah disampaikan kepada pimpinan Universitas Islam Riau selambat-lambatnya 1 (satu) minggu setelah ujian dilaksanakan.

4. Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan bila terdapat kekeliruan akan segera diperbaiki sebagaimana mestinya.

Kutipan : Disampaikan kepada yang bersangkutan untuk dapat dilaksanakan dengan sebaik-baiknya.



Ditetapkan di : Pekanbaru
Pada Tanggal : 20 Januari 2021

Dekan

Dr. Firdaus AR, SE., M.Si., Ak., CA

Tembusan : Disampaikan pada :

1. Yth : Bapak Koordinator Kopertis Wilayah X di Padang
2. Yth : Bapak Rektor Universitas Islam Riau di Pekanbaru
3. Yth : Sdr. Kepala Biro Keuangan UIR di Pekanbaru
4. Yth : Sdr. Kepala BAAK UIR di Pekanbaru

UNIVERSITAS ISLAM RIAU
FAKULTAS EKONOMI

Alamat : Jalan Kaharuddin Nasution No 113 Marpoyan Pekanbaru Telp 647647

BERITA ACARA SEMINAR HASIL PENELITIAN SKRIPSI

Nama : Diah Ariatin
NPM : 155310590
Jurusan : Akuntansi / S1
Judul Skripsi : Pengaruh Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) Terhadap Penerapan Good Governance Pada Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Riau.
Hari/Tanggal : Rabu 20 Januari 2021
Tempat : Ruang Sidang Fakultas Ekonomi UIR

Dosen Pembimbing

No	Nama	Tanda Tangan	Keterangan
1	Dr. Firdaus AR, SE., M.Si., Ak., CA		

Dosen Pembahas / Penguji

No	Nama	Tanda Tangan	Keterangan
1	Hj. Alfurkaniati, SE., M.Si., Ak., CA		
2	Dina Hidayat, SE., M.Si., Ak., CA		

Hasil Seminar : *)

1. Lulus (Total Nilai)
2. Lulus dengan perbaikan (Total Nilai **67,5**)
3. Tidak Lulus (Total Nilai)

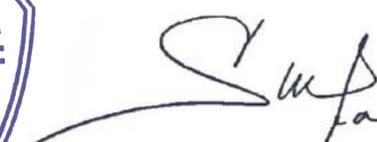
Mengetahui
An.Dekan



Dr. Hj. Ellyan Sastraningsih, SE., M.Si.
Wakil Dekan I



Pekanbaru, 20 Januari 2021
Ketua Prodi



Dr. Hj. Siska, SE., M.Si., Ak., CA

*) Coret yang tidak perlu

UNIVERSITAS ISLAM RIAU
FAKULTAS EKONOMI

Alamat : Jalan Kaharuddin Nst Km 11 No 113 Marpoyan Pekanbaru Telp 647647

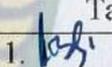
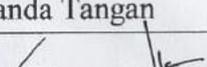
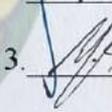
BERITA ACARA SEMINAR PROPOSAL

Nama : Dian Ariatin
NPM : 155310590
Judul Proposal : Pengaruh Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) Terhadap Penerapan Good Governance
Pembimbing : 1. Dr. Firdaus AR, SE., M.Si., Ak., CA
Hari/Tanggal Seminar : Rabu / 11 Maret 2020

Hasil Seminar dirumuskan sebagai berikut :

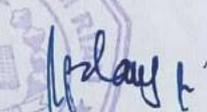
1. Judul : Disetujui dirubah/perlu diseminarkan *)
2. Permasalahan : Jelas/masih kabur/perlu dirumuskan kembali *)
3. Tujuan Penelitian : Jelas/mengambang/perlu diperbaiki *)
4. Hipotesa : Cukup tajam/perlu dipertajam/di perbaiki *)
5. Variabel yang diteliti : Jelas/Kurang jelas *)
6. Alat yang dipakai : Cocok/belum cocok/kurang *)
7. Populasi dan sampel : Jelas/tidak jelas *)
8. Cara pengambilan sampel : Jelas/tidak jelas *)
9. Sumber data : Jelas/tidak jelas *)
10. Cara memperoleh data : Jelas/tidak jelas *)
11. Teknik pengolahan data : Jelas/tidak jelas *)
12. Daftar kepustakaan : Cukup/belum cukup mendukung pemecahan masalah Penelitian *)
13. Teknik penyusunan laporan : Telah sudah/belum memenuhi syarat *)
14. Kesimpulan tim seminar : Perlu/tidak perlu diseminarkan kembali *)

Demikianlah keputusan tim yang terdiri dari :

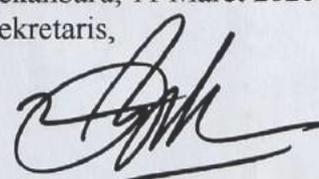
No	Nama	Jabatan pada Seminar	Tanda Tangan
1.	Dr. Firdaus AR, SE.,M.Si.,Ak.,CA		1. 
2.	Dina Hidayat, SE., M.Si., Ak., CA		2. 
3.	Nina Nursida, SE., M.Acc		3. 

*Coret yang tidak perlu

Mengetahui
A.n. Dekan Bidang Akademis,


Dr. Firdaus AR, SE., M.Si., Ak., CA

Pekanbaru, 11 Maret 2020
Sekretaris,


Dra. Eny Wahyuningsih, M.Si., CA

SURAT KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS EKONOMI UNIVERSITAS ISLAM RIAU
Nomor: 2625/Kpts/FE-UIR/2019
TENTANG PENUNJUKAN DOSEN PEMBIMBING SKRIPSI MAHASISWA S1
Bismillahirrohmanirrohim
DEKAN FAKULTAS EKONOMI UNIVERSITAS ISLAM RIAU

Menimbang : 1. Surat penetapan Ketua Jurusan / Program Studi Akuntansi tanggal 05 Oktober 2019 tentang penunjukan Dosen Pembimbing skripsi mahasiswa.
 2. Bahwa dalam membantu mahasiswa untuk menyusun skripsi sehingga mendapat hasil yang baik perlu ditunjuk Dosen Pembimbing yang akan memberikan bimbingan sepenuhnya terhadap Mahasiswa tersebut

Mengingat : 1. Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003
 2. Undang-Undang RI Nomor:14 Tahun 2005
 3. Undang-Undang RI Nomor:12 Tahun 2012
 4. Peraturan Pemerintah RI Nomor : 4 Tahun 2014
 5. Surat Keputusan BAN PT Depdiknas RI :
 a. Nomor : 192/SK/BAN-PT/Ak.XVI/S/IX/2013, tentang Akreditasi Eko. Pembangunan
 b. Nomor : 197/SK/BAN-PT/Ak.XVI/S/IX/2013, tentang Akreditasi Manajemen
 c. Nomor : 197/SK/BAN-PT/Ak.XVI/S/IX/2013, tentang Akreditasi Akuntansi S1
 d. Nomor : 001/SK/BAN-PT/Akred/Dpl-III/I/2014 Tentang Akreditasi D.3 Akuntansi
 6. Surat Keputusan YLPI Daerah Riau
 a. Nomor: 66/Skep/YLPI/II/1987
 b. Nomor: 10/Skep/YLPI/IV/1987
 7. Statuta Universitas Islam Riau Tahun 2013
 8. Surat Edaran Rektor Universitas Islam Riau tanggal 10 Maret 1987
 a. Nomor: 510/A-UIR/4-1987

MEMUTUSKAN

Menetapkan: 1. Mengangkat Saudara-saudara yang tersebut namanya di bawah ini sebagai Pembimbing dalam penyusunan skripsi yaitu:

No	N a m a	Jabatan/Golongan	Keterangan
1	Dr. Firdaus AR, SE., M.Si, Ak, CA	Lektor Kepala, IV/a	Pembimbing

② Mahasiswa yang dibimbing adalah:
 N a m a : Diah Ariatin
 N P M : 155310590
 Jurusan/Jenjang Pendid. : Akuntansi / S1
 Judul Skripsi : Pengaruh Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) Terhadap Penerapan Good Governance Pada Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Riau.

3. Tugas pembimbing adalah berpedoman kepada Surat Keputusan Rektor Universitas Islam Riau Nomor: 52/UIR/Kpts/1989 tentang pedoman penyusunan skripsi mahasiswa di lingkungan Universitas Islam Riau.
 4. Dalam pelaksanaan bimbingan supaya memperhatikan usul dan saran dari forum seminar proposal
 5. Kepada pembimbing diberikan honorarium sesuai dengan peraturan yang berlaku di Universitas Islam Riau.
 6. Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan bila terdapat kekeliruan dalam keputusan ini segera akan ditinjau kembali.

Kutipan: Disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan menurut semestinya.



Ditetapkan di: Pekanbaru
 Pada Tanggal: 07 Oktober 2019
 Dekan,

Drs. H. Abrar, M.Si, Ak, CA

Tembusan : Disampaikan pada:

1. Yth : Bapak Rektor Universitas Islam Riau
2. Yth : Sdr. Kepala Biro Keuangan UIR di Pekanbaru.



UNIVERSITAS ISLAM RIAU

FAKULTAS EKONOMI

الْجَامِعَةُ الْإِسْلَامِيَّةُ الرَّيْوِيَّةُ

Alamat : Jalan Kaharuddin Nasution No. 113, Marpoyan, Pekanbaru, Riau, Indonesia - 28284
Telp. +62 761 674674 Fax. +62 761 674834 Email : fekon@uir.ac.id Website : www.ac.uir.id

SURAT KETERANGAN BEBAS PLAGIARISME

Ketua Program Studi Akuntansi S1 Fakultas Ekonomi Universitas Islam Riau Menerangkan bahwa mahasiswa dengan identitas berikut:

Nama : DIAH ARIATIN
NPM : 155310590
Program Studi : Akuntansi S1
Judul Skripsi : PENGARUH IMPLEMENTASI SISTEM AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (SAKIP) TERHADAP PENERAPAN GOOD GOVERNANCE PADA BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH PROVINSI RIAU

Dinyatakan sudah memenuhi syarat batas maksimal plagiasi Kurang dari 30 % yaitu 30 % pada setiap subbab naskah skripsi yang disusun dan telah masuk dalam *institution paper repository*, Surat Keterangan ini digunakan sebagai prasyarat untuk pengurusan surat keterangan bebas pustaka.

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk dapat digunakan sebagaimana mestinya.

Pekanbaru, 9 Maret 2021
Ketua Program Studi Akuntansi

Siska, SE., M.Si., Ak., CA

PERNYATAAN

Dengan ini saya menyatakan :

1. Karya tulis skripsi ini adalah asli dan belum pernah diajukan untuk mendapatkan gelar Akademik Sarjana, baik di Universitas Islam Riau maupun di Perguruan Tinggi lainnya.
2. Karya tulis ini murni gagasan, rumusan dan penilaian saya sendiri tanpa bantuan pihak manapun, kecuali arahan dari Tim Pembimbing.
3. Dalam karya ini tidak terdapat karya atau pendapat yang telah ditulis atau dipublikasikan orang lain, kecuali secara tertulis dalam naskah dengan disebutkan pengarah dan dicantumkan dalam daftar pustaka.
4. Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila dikemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidakbenaran dalam pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi Akademik berupa pencabutan yang diperoleh karena karya tulis ini, serta sanksi lain sesuai dengan norma yang berlaku di Perguruan Tinggi ini.

Pekanbaru,.....

Saya yang membuat pernyataan

.....

ABSTRAK

PENGARUH IMPLEMENTASI SISTEM AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (SAKIP) TERHADAP PENERAPAN *GOOD GOVERNANCE* PADA BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH PROVINSI RIAU

Oleh:

Diah Ariatin

NPM: 155310590

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui (1) Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) Pada Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Riau, (2) Penerapan *Good Governance* Pada Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Riau dan (3) Pengaruh Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) terhadap penerapan *Good Governance* pada Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Riau

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif analisis dengan pendekatan survei. Sumber data yang diperoleh untuk pembuatan skripsi ini berasal dari penyebaran kuesioner dengan Pegawai Negeri Sipil Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Riau pada Bagian Bidang Perencanaan dan Program, Bidang Anggaran Daerah, Bidang Perbendaharaan dan Kas, dan Bidang Akuntansi dan Pelaporan secara keseluruhan berjumlah 32 orang.

Hasil penelitian yang diperoleh adalah: (1) Implementasi system akuntabilitas kinerja instansi pemerintah (SAKIP) pada Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Riau termasuk klasifikasi baik dengan nilai rata-rata 4,19. (2) Penerapan *Good Governance* pada Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Riau termasuk dalam kategori sangat baik dengan nilai rata-rata 4,54. (3) Dan Implementasi sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah berpengaruh signifikan terhadap Penerapan *Good Governance* pada Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Riau.

Kata Kunci: Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), *Good Governance*.

ABSTRACT

THE EFFECT OF THE IMPLEMENTATION OF ACCOUNTABILITY SYSTEM PERFORMANCE OF GOVERNMENT INSTITUTIONS (SAKIP) ON THE IMPLEMENTATION OF GOOD GOVERNANCE IN THE FINANCIAL AND ASSETS MANAGEMENT AGENCY OF RIAU PROVINCE

By:

Diah Ariatin

NPM: 155310590

The purpose of this study was to determine (1) Implementation of the performance accountability system for government agencies (SAKIP) in the Regional Financial and Asset Management Agency Riau Province, (2) Implementation of Good Governance in the Regional Financial and Asset Management Agency of Riau Province and (3) The effect of accountability system implementation performance of government agencies (SAKIP) on the implementation of Good Governance in the Regional Financial and Asset Management Agency of Riau Province.

The research method used in this research is descriptive analysis with a survey approach. The data source obtained for the preparation of this thesis came from distributing questionnaires with Civil Servants of the Regional Financial and Asset Management Agency of Riau Province in the Planning and Program Division, Regional Budget, Treasury and Cash, and Accounting and Reporting Fields totaling 32 people.

The results obtained are: (1) Implementation of the performance accountability system of government agencies (SAKIP) at the Regional Financial and Asset Management Agency of Riau Province, including a good classification with an average value of 4.19, (2) The implementation of Good Governance at the Regional Financial and Asset Management Agency of Riau Province is included in the very category with an average score of 4.54, and (3) The implementation of the performance accountability system of government agencies has a significant effect on the implementation of Good Governance at the Regional Financial and Asset Management Agency of Riau Province.

Keywords : *Government Agency Performance Accountability System (SAKIP), Good Governance.*

KATA PENGANTAR

Bismillahirrahmanirrahim

Dengan mengucapkan Puji dan Syukur Kehadirat Allah SWT, Karena dengan rahmat, petunjuk dan karunia-Nya penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi yang berjudul **“PENGARUH IMPLEMENTASI SISTEM AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (SAKIP) TERHADAP PENERAPAN *GOOD GOVERNANCE* PADA BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH PROVINSI RIAU”**, guna memenuhi persyaratan untuk memperoleh gelar Sarjana Ekonomi (SE) pada Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Islam Riau.

Penulis percaya bahwa segala sesuatu yang terjadi merupakan izin dari ketetapan Allah SWT, namun penyusunan skripsi ini tidak lepas dari orang-orang disekitar penulis yang begitu banyak memberikan bantuan serta dukungan. Maka pada kesempatan ini izinkan penulis mengucapkan rasa terimakasih kepada:

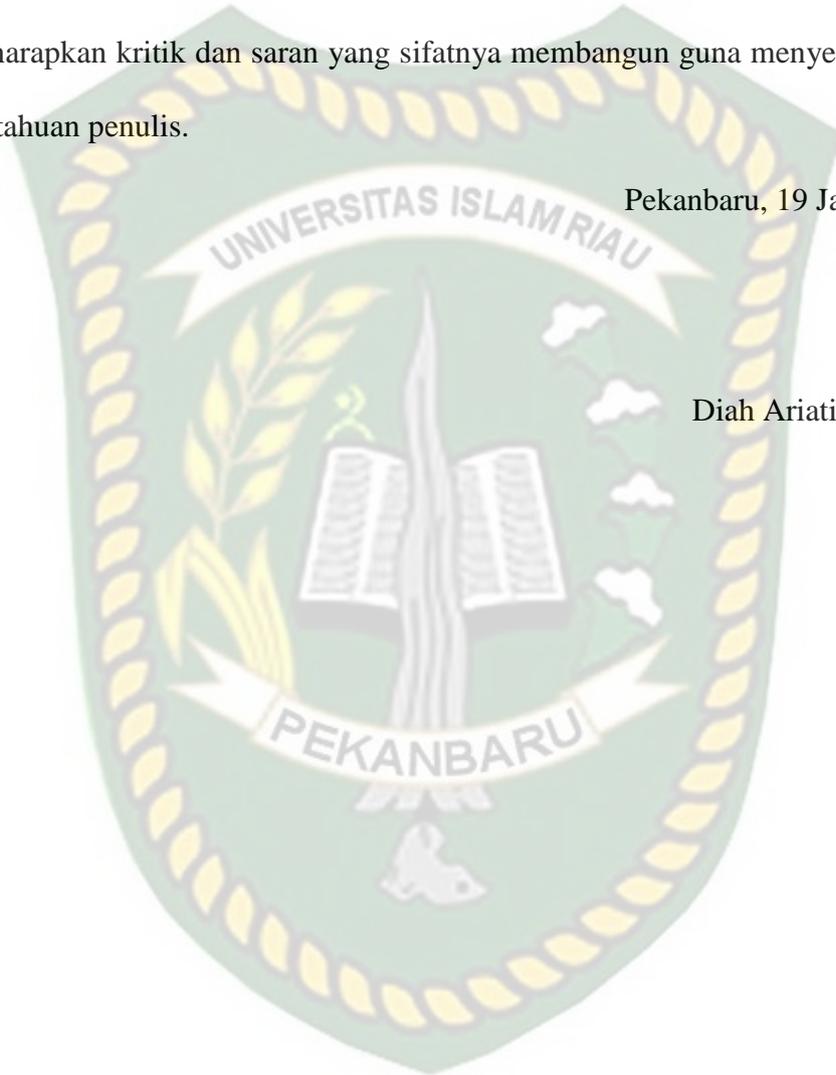
1. Bapak Prof.Dr. H. Syafrinaldi SH., MCL selaku Rektor Universitas Islam Riau.
2. Bapak Dr.Firdaus Ar SE., M.Si, Ak., CA Selaku Dekan Fakultas Ekonomi Universitas Islam Riau dan selaku Dosen Pembimbing yang telah banyak meluangkan waktu, tenaga serta pikiran bersedia membimbing penulis dalam menyempurnakan skripsi ini.
3. Ibu Hj. Siska, SE, M.Si,AK, CA Selaku Ketua Jurusan Program Studi Ekonomi Akuntansi S1 Fakultas Ekonomi Universitas Islam Riau.

4. Bapak/Ibu Dosen yang telah memberikan pengetahuannya kepada penulis selama proses perkuliahan. Semoga semua ilmu yang diberikan selalu dalam keberkahan Allah SWT, sehingga dapat berguna dikemudian hari. Seluruh pimpinan, staf tata usaha, staf perpustakaan Fakultas Ekonomi dan Universitas Islam Riau yang telah banyak membantu penulis dalam proses penyelesaian skripsi ini.
5. Bapak Kepala dan beserta Staf/ Pengurus Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Riau yang telah membantu memberikan data-data beserta informasi-informasi yang berkaitan dengan penelitian.
6. Secara khusus kepada ibu, bapak, dan seluruh keluarga atas segala curahan kasih sayang, perhatian, dukungan dan pengarahan serta do'a yang selalu dipanjatkan kepada-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.
7. Rekan – rekan mahasiswa Program Studi Strata Satu (S1) Akuntansi Universitas Islam Riau dan semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu baik secara langsung maupun tidak langsung yang telah membantu hingga selesainya skripsi ini.

Penulis menyadari sepenuhnya bahwa penulisan skripsi ini jauh dari kesempurnaan. Hal ini tidak terlepas dari keterbatasan dan kesempurnaan serta pengalaman penulis. Oleh karena itu, dengan segala kerendahan hati penulis mengharapkan kritik dan saran yang sifatnya membangun guna menyempurnakan pengetahuan penulis.

Pekanbaru, 19 Januari 2021

Diah Ariatin



DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN SAMPUL	
HALAMAN JUDUL	
PENGESAHAN SKRIPSI	iii
NOTULENSI SEMINAR HASIL	iv
BERITA ACARA BIMBINGAN SKRIPSI	v
BERITA ACARA UJIAN SKRIPSI	vi
SK PENGUJI	vii
BERITA ACARA SEMINAR HASIL	viii
BERITA ACARA SEMINAR PROPOSAL	ix
SK PEMBIMBING	x
SURAT KETERANGAN BEBAS PLAGIARISME	xi
LEMBAR PERNYATAAN	xii
ABSTRAK	xiv
ABSTRAC	
KATA PENGANTAR	xiv
DAFTAR ISI	xviii
DAFTAR TABEL	xx
DAFTAR GAMBAR	xxi
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang Masalah	1
1.2 Rumusan Masalah	5
1.3 Tujuan Penelitian	6
1.4 Manfaat Penelitian	6
1.5 Sistematika Penulisan	8
BAB II TELAAH PUSTAKA DAN HIPOTESIS	9
2.1 Telaah Pustaka	9
2.1.1 Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP)	9
2.1.2 Unsur SAKIP	10
2.1.3 Ruang Lingkup SAKIP	11
2.1.4 Sasaran SAKIP	12
2.1.5 Manfaat SAKIP	12
2.1.6 Keunggulan SAKIP	13
2.1.7 Siklus SAKIP	13
2.1.8 Pengertian <i>Good Governance</i>	14
2.1.9 Prinsip-prinsip <i>Good Governance</i>	15
2.1.10 Manfaat <i>Good Governance</i>	15
2.1.11 Faktor-faktor yang Mempengaruhi <i>Good Governance</i>	16
2.1.12 Peran Pemerintah Dalam Proses <i>Good Governance</i>	17
2.1.13 Hubungan SAKIP Terhadap <i>Good Governance</i>	17
2.1.14 Penelitian Terdahulu	19
2.1.15 Model Penelitian	20

2.2 Hipotesis	21
---------------------	----

BAB III METODE PENELITIAN 22

3.1 Desain Penelitian	22
3.2 Objek Penelitian	22
3.3 Definisi Operasional Variabel Penelitian	22
3.4 Populasi dan Sampel	25
3.5 Jenis dan Sumber Data	26
3.6 Teknik Pengumpulan Data	26
3.7 Uji Kualitas Data	28
3.7.1 Uji Instrumen Penelitian	28
3.7.1.1 Uji Validitas	28
3.7.1.2 Uji Reliabilitas	29
3.7.1.3 Uji Normalitas	29
3.8 Teknik Analisis Data	30
3.9 Pengujian Hipotesis	30
3.9.1 Pengujian Secara Parsial (Uji t)	30
3.10 Koefisien Determinasi	31

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 32

4.1 Gambaran Umum Objek Penelitian	32
4.1.1 Sejarah Singkat	32
4.1.2 Visi dan Misi	32
4.1.3 Struktur Organisasi	33
4.2 Hasil Penelitian	44
4.2.1 Karakteristik Responden	45
4.2.1.1 Karakteristik Berdasarkan Jenis Kelamin	45
4.2.1.2 Karakteristik Berdasarkan Usia	45
4.2.1.3 Karakteristik Berdasarkan Tingkat Pendidikan	46
4.2.1.4 Berdasarkan Masa Kerja	47
4.2.2 Hasil Analisis Deskriptif	48
4.2.2.1 Tanggapan Responden Terhadap Variabel X	48
4.2.2.2 Tanggapan Responden Terhadap Variabel Y	52
4.2.2.3 Rekapitulasi Tanggapan Responden	55
4.2.3 Hasil Pengujian	57
4.2.3.1 Uji Validitas	57
4.2.3.2 Uji Reliabilitas	58
4.2.3.3 Uji Normalitas Data	59
4.2.3.4 Teknik Analisis Data	60
4.2.3.5 Pengujian Hipotesis (Uji t)	61
4.2.3.6 Koefisien Determinasi	62
4.2.4 Pembahasan Hasil Penelitian	63
4.2.4.1 Implementasi SAKIP	63
4.2.4.2 Penerapan <i>Good Governance</i>	63
4.2.4.3 Pengaruh SAKIP terhadap <i>Good Governance</i>	64

BAB V SIMPULAN DAN SARAN	66
5.1 Simpulan	66
5.2 Saran	66

DAFTAR PUSTAKA
LAMPIRAN



Dokumen ini adalah Arsip Miik :
Perpustakaan Universitas Islam Riau

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1	Penelitian Terdahulu	19
Tabel 3.1	Definisi Operasional Variabel Penelitian	24
Tabel 3.2	Bidang yang diteliti	26
Tabel 3.3	Instrumen Skala Likert	27
Tabel 3.4	Kategori Berdasarkan Interval Skor	27
Tabel 4.1	Responden Berdasarkan Jenis Kelamin.....	45
Tabel 4.2	Responden Berdasarkan Usia	46
Tabel 4.3	Responden Berdasarkan Tingkat Pendidikan	47
Tabel 4.4	Responden Berdasarkan Masa Kerja.....	47
Tabel 4.5	Tanggapan Responden Terhadap Indikator Rencana Strategis	49
Tabel 4.6	Tanggapan Responden Terhadap Indikator Rencana Kerja	49
Tabel 4.7	Tanggapan Responden Terhadap Indikator Pengukuran Kinerja....	50
Tabel 4.8	Tanggapan Responden Terhadap Indikator Evaluasi Kinerja	51
Tabel 4.9	Tanggapan Responden Terhadap Indikator Akuntabilitas Kinerja .	51
Tabel 4.10	Tanggapan Responden Terhadap Indikator Akuntabilitas	52
Tabel 4.11	Tanggapan Responden Terhadap Indikator Transparansi	53
Tabel 4.12	Tanggapan Responden Terhadap Indikator Keterbukaan	54
Tabel 4.13	Tanggapan Responden Terhadap Indikator Aturan Hukum.....	54
Tabel 4.14	Rekapitulasi Hasil Tanggapan Responden Terhadap Variabel Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP)	55
Tabel 4.15	Rekapitulasi Hasil Tangaapan Responden Terhadap Variabel <i>Good Governance</i>	56
Tabel 4.16	Hasil Perhitungan Validitas Variabel Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP)	57
Tabel 4.17	Hasil Perhitungan Validitas Variabel <i>Good Governance</i>	58
Tabel 4.18	Hasil Perhitungan Reliabilitas Instrumen Penelitian	59
Tabel 4.19	Hasil Uji Normalitas Data	59
Tabel 4.20	Analisis Regresi Linier Sederhana	60
Tabel 4.21	Analisis Uji t.....	61
Tabel 4.22	Hasil Uji Koefisien Determinasi.....	62

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1 Model Penelitian.....	21
Gambar 4.1 Struktur Organisasi.....	34



BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Good Governance atau tata kelola pemerintahan yang baik mulai dikenal di Indonesia pada era reformasi. Istilah *good governance* pertama kali dipopulerkan oleh Bank Dunia pada tahun 1990an sebagai bentuk perlawanan terhadap konsep *government* yang dinilai memiliki banyak kelemahan karena meremehkan kekuatan atau minimnya partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan.

Di Indonesia isu *good governance* telah memasuki arena perdebatan pembangunan yang di dorong oleh adanya dinamika yang menuntut perubahan-perubahan di sisi pemerintahan maupun disisi warga. Ke depan, pemerintah dan pemimpin politik diharapkan menjadi lebih demokratis, efisien dalam pembangunan sumber daya public, efektif menjalankan fungsi pelayanan public, lebih tanggap serta mampu menyusun kebijakan, program dan hukum yang dapat menjamin hak asasi dan keadilan sosial. Sejalan dengan itu, wargapun diharapkan menjadi warga yang memiliki kesadaran akan hak dan kewajiban, lebih terinformasi, memiliki solidaritas terhadap sesama, bersedia berpartisipasi aktif dalam penyelenggaraan urusan publik lainnya dan tidak mementingkan diri sendiri, Tahir (2015:104).

Pemerintahan yang baik dan bersih pada umumnya terletak pada masyarakat yang ikut andil dalam control sosial yang efektif yang merupakan ciri-ciri masyarakat demokratis sehingga kekuasaan pemerintahanya terbatas dan tidak bisa sewenang-wenang dimana hal ini telah di atur di dalam TAP MPR

No.XI/MPR/1998 tentang penyelenggaraan negara yang bersih dan bebas korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN).

Menurut Mardiasmo dalam Depi Oktia (2013) menyatakan bahwa *good governance* adalah suatu tatanan kehidupan berbangsa dan bernegara yang pola sikap dan pola tindak pelakunya dilandasi prinsip-prinsip dan karakteristik tertentu. Suatu penyelenggaraan negara yang mengimplementasikan *Good Governance* berarti penyelenggaraan negara tersebut mendasarkan diri pada prinsip-prinsip partisipasi, pemerintahan berdasarkan hukum, transparansi, responsivitas, orientasi consensus, keadilan, efektivitas dan efisiensi, akuntabilitas, visi strategis dan saling keterkaitan.

Agar terciptanya *good governance* atau tata pemerintahan yang baik, salah satu cara yang dilakukan pemerintah adalah dengan adanya sistem pengukuran kinerja yang baik. Seiring dengan perkembangan waktu, pengukuran kinerja pada instansi pemerintahan mengalami perubahan orientasi yaitu pengukuran kinerja yang berorientasi pada input (lebih spesifik anggaran) bergeser pada pengukuran kinerja yang berorientasi pada hasil (*result oriented government*) (Asmoko, 2014).

Dalam rangka mendukung terlaksananya sistem pengukuran kinerja maka pemerintah membuat sistem pengukuran kinerja dengan nama Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) merupakan sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintahan dimana sistem ini merupakan integrasi dari sistem pelaporan kinerja yang selaras dengan pelaksanaan sistem akuntabilitas keuangan (Pasinringi, 2010).

Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) merupakan integrasi dari sistem perencanaan, sistem penganggaran dan sistem pelaporan kinerja, yang selaras dengan pelaksanaan sistem akuntabilitas keuangan. Dalam hal ini, setiap organisasi diwajibkan mencatat dan melaporkan setiap penggunaan keuangan negara serta kesesuaiannya dengan ketentuan yang berlaku, Asmoko (2014).

Pada Tahun 1999 Pemerintah Indonesia mulai mengeluarkan Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 yang menjadi acuan dalam pengukuran kinerja, baik pengukuran kinerja pemerintahan pusat maupun daerah. Instruksi Presiden tersebut berisi amanat yang mengharuskan setiap Instansi Pemerintahan melaksanakan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah mengharuskan setiap instansi pemerintah menjelaskan dan mempertanggung jawabkan mengenai keberhasilan maupun kegagalan tingkat kerja yang telah dicapainya dengan melaporkan atau membuat dokumen yang disebut Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP).

Dalam Instruksi Presiden No.7 Tahun 1999 dikatakan bahwa tujuan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah adalah mendorong terciptanya akuntabilitas kinerja instansi pemerintah sebagai salah satu syarat terciptanya pemerintahan yang baik (*good governance*) dan terpercaya. Untuk mewujudkannya adalah dengan mengimplementasikan sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah pada instansi pemerintahan.

Penerapan sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah dan *good governance* memiliki keterkaitan erat berdasarkan pertimbangan bahwa pelaporan sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah menjadi alat dalam mempertanggung jawabkan/ tanggung gugat/ kewajiban memberikan jawaban, sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah menjadi alat untuk mewujudkan *good governance*, sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah digunakan sebagai media jawaban atas tantangan akuntansi sector public dalam mewujudkan akuntabilitas public, serta *good governance* yang menjadi tujuan akhir dari Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah hal ini tertuang di dalam LAN dan BPKP 2000 dalam Jajang dan Irna (2012).

Penelitian ini berdasarkan dari penelitian yang telah dilakukan oleh Ati Rosliyati (2014) tentang pengaruh implementasi sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah (SAKIP) terhadap penerapan *good governance* pada Badan Kepegawaian Pendidikan dan Latihan Daerah Kabupaten Tasikmalaya. Perbedaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya adalah pada objek penelitian. Peneliti tertarik untuk melakukan penelitian ulang di Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Riau apakah dengan objek yang berbeda dapat menghasilkan penelitian yang sama atau berbeda.

Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Provinsi Riau yang terletak di Jalan Cut Nyak Dien kelurahan Jadirejo kecamatan Sukajadi Kota Pekanbaru terbentuk berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2014 tentang Organisasi Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Lembaga Teknis Daerah Provinsi Riau. BPKAD Provinsi Riau mempunyai tugas membantu

kepala daerah dalam merumuskan dan melaksanakan kebijakan daerah di bidang pengelolaan keuangan dan aset serta melaksanakan penyelenggaraan sebagian kewenangan yang dilimpahkan oleh Pemerintah kepada Gubernur selaku wakil pemerintah di daerah.

Pada Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Provinsi Riau masih banyak terdapat permasalahan-permasalahan yang berhubungan dengan penerapan sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah dan penerapan tata pemerintahan yang baik dan benar (*good governance*) diantaranya: (1) Kurangnya transparansi dalam pengelolaan data dan informasi serta kurangnya komunikasi kepada publik (2) Akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah meliputi implementasi penganggaran dan akuntansi berbasis akrual belum optimal (3) Pengelolaan barang milik daerah yang belum sesuai dengan azas fungsi, kepastian hukum, efisiensi, akuntabilitas dan kepastian nilai dan (4) Kualitas dan efektifitas perbendaharaan dan manajemen kas daerah yang belum efektif, efisien dan ekonomis (Sumber: Rencana Kerja BPKAD Provinsi Riau 2018).

Berdasarkan permasalahan tersebut, maka penulis tertarik untuk mempelajari dan meneliti lebih lanjut mengenai Pengaruh Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) Terhadap Penerapan *Good Governance* pada BPKAD Provinsi Riau.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dikemukakan di atas, dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimana Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Riau?
2. Bagaimana penerapan *Good Governance* di Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Riau?
3. Bagaimana Pengaruh Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah terhadap penerapan *Good Governance* di Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Riau?

1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk Mengetahui implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah pada Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Riau.
2. Untuk Mengetahui penerapan *Good governance* pada Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Riau.
3. Untuk Mengetahui seberapa besar pengaruh Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah terhadap penerapan *Good governance* pada Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Riau.

1.4 Manfaat Penelitian

Adapun manfaat dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

- 1) Memberikan sumbangan terhadap pengembangan ilmu pengetahuan, khususnya di bidang akuntansi sektor publik yang berhubungan dengan implementasi sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah terhadap penerapan *good governance*.
- 2) Sebagai sumber referensi serta acuan bagi peneliti lain yang berkeinginan melakukan penelitian sejenis.

2. Manfaat Praktis

- 1) Bagi Pihak Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Riau. Diharapkan penelitian ini dapat memberikan masukan dan sebagai acuan perbaikan dalam sistem akuntabilitas kinerja yang baik bagi BPKAD.
- 2) Bagi Akademis. Diharapkan penelitian ini dapat digunakan sebagai tambahan informasi serta wawasan mengenai Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah terhadap *good governance* dalam instansi sektor publik dan dapat menjadi bahan referensi untuk penelitian mahasiswa dimasa yang akan datang.
- 3) Bagi Peneliti. Diharapkan penelitian ini dapat menambah wawasan dan pemahaman penulis tentang implementasi sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah terhadap *good governance* serta dapat menerapkan teori-teori dan pengetahuan yang diperoleh pada saat perkuliahan terhadap kenyataan di lapangan.

1.5 Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan yang diterapkan sebagai berikut:

BAB I : PENDAHULUAN

Dalam bab ini menjelaskan tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian serta sistematika penulisan.

BAB II : TELAAH PUSTAKA DAN HIPOTESIS

Dalam bab ini akan diuraikan mengenai tinjauan literature yang berkaitan dan menjadi acuan dalam pembahasan materi penelitian.

BAB III : METODE PENELITIAN

Dalam bab ini akan dijelaskan mengenai jenis penelitian, metode penelitian, hipotesis dan teknik pengumpulan data.

BAB IV : HASIL DAN PEMBAHASAN

Dalam bab ini akan diuraikan gambaran umum objek penelitian, hasil penelitian dan pembahasan dari penelitian yang meliputi pengujian terhadap model penelitian.

BAB V : SIMPULAN DAN SARAN

Dalam bab ini dipaparkan kesimpulan dari peneliti dan saran yang dapat disampaikan terkait hasil dari penelitian yang telah dilakukan.

BAB II

TELAAH PUSTAKA DAN HIPOTESIS

2.1 Telaah Pustaka

2.1.1 Pengertian Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP)

Dengan bertambahnya tuntutan masyarakat mengenai penyelenggaraan pemerintahan yang baik dan bersih, pemerintah berupaya menerapkan sistem pertanggungjawaban yang terukur dan sah. Salah satunya dengan cara menerapkan sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah (SAKIP) dengan tujuan agar penyelenggaraan pemerintah dapat berjalan dengan baik, bertanggung jawab dan terhindar dari praktik-praktik korupsi, kolusi dan nepotisme.

Dalam Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 dinyatakan bahwa sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah adalah:

Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) merupakan rangkaian sistematis dari berbagai aktivitas, alat, dan prosedur yang dirancang untuk tujuan penetapan dan pengukuran, pengumpulan data, pengklasifikasian, pengikhtisaran, dan pelaporan kinerja pada instansi pemerintah, dalam rangka pertanggungjawaban dan peningkatan kinerja instansi pemerintah.

Sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah dalam Keputusan Menteri Perdagangan RI Nomor 1332/M-DAG/KEP/12/2010 tahun 2010:

Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) adalah (a) instrumen yang digunakan instansi pemerintah dalam memenuhi kewajiban untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan misi organisasi, terdiri dari berbagai komponen yang merupakan suatu kesatuan, yaitu perencanaan strategis, perencanaan kinerja, pengukuran kinerja, dan pelaporan kinerja; atau (b) rangkaian sistematis dari berbagai aktivitas dan prosedur yang dirancang untuk tujuan penetapan dan pengukuran kinerja, pemantauan kinerja, evaluasi kinerja dan pelaporan kinerja pada instansi pemerintah, dalam rangka pertanggungjawaban dan peningkatan kinerja instansi pemerintah.

Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah menurut Wakhyudi *et.al* (2011:2) adalah:

Sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah adalah rangkaian proses yang sistematis dari berbagai komponen, alat dan prosedur yang dirancang untuk mencapai tujuan manajemen kinerja, yaitu perencanaan, penetapan kinerja dan pengukuran, pengumpulan data, pengklasifikasian, pengikhtisaran, dan pelaporan kinerja pada instansi pemerintah dalam rangka pertanggungjawaban dan peningkatan kinerja instansi pemerintah.

Berdasarkan pada pengertian yang telah dikemukakan di atas, maka sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah adalah suatu alat yang digunakan untuk mempertanggung jawabkan dalam mengukur atau pengukuran kinerja suatu penyelenggaraan pemerintah yang terdiri dari perencanaan strategis, perencanaan kinerja, pengukuran kinerja dan pelaporan kinerja.

2.1.2 Unsur-unsur di dalam Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP)

Untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan dan kegagalan dalam pelaksanaan misi organisasi (LAN & BPKP, 2006: 63) dalam Jajang dan Irna (2012). Pelaksanaan SAKIP itu sendiri terdiri dari lima unsur dengan penjabaran sebagai berikut:

1. Rencana Strategis/Renstra
INPRES No. 7 Tahun 1999 menyebutkan bahwa perencanaan strategik merupakan suatu proses yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai selama kurun waktu satu sampai lima tahun dengan memperhitungkan potensi, peluang dan kendala yang ada dan mungkin timbul. Rencana strategik mengandung visi, misi, tujuan dan sasaran. Cara mencapai tujuan dan sasaran yang meliputi kebijaksanaan, program kegiatan yang realistis dengan mengantisipasi perkembangan masa depan.
2. Rencana Kinerja
Perencanaan kinerja merupakan proses penyusunan rencana kinerja sebagai penjabaran dasar dari sasaran dan program yang telah ditetapkan dalam rencana strategik, yang akan dilaksanakan oleh instansi pemerintah melalui berbagai kegiatan secara tahunan. Dalam rencana

kinerja ditetapkan target kinerja tahunan untuk seluruh indikator kinerja yang ada pada tingkat sasaran. Kegiatan rencana kerja ini disusun setiap awal tahun anggaran dan merupakan komitmen bagi instansi untuk mencapainya dalam suatu periode tahunan.

3. Pengukuran Kinerja
Pengukuran kinerja merupakan suatu alat manajemen yang digunakan untuk meningkatkan kualitas pengambilan keputusan dan akuntabilitas dalam rangka menilai keberhasilan/ kegagalan pelaksanaan kegiatan/ program/ kebijakan sesuai dengan sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan dalam rangka mewujudkan visi dan misi instansi pemerintah (LAN, 2000: 47).
4. Evaluasi Kinerja
Evaluasi kinerja merupakan kegiatan untuk menilai atau melihat keberhasilan dan kegagalan suatu organisasi atau unit kerja dalam melaksanakan tugas dan fungsi yang dibebankan kepadanya. Evaluasi kinerja merupakan analisis dan interpretasi keberhasilan atau kegagalan pencapaian kinerja. Dalam melakukan evaluasi kinerja, hasilnya dikaitkan dengan sumber daya (*input*) yang berada di bawah wewenangnya, seperti sumber daya manusi, dana/ keuangan, sarana-prasarana, metode kerja, dan hal lainnya yang berkaitan (LAN, 2000:1).
5. Analisis Akuntabilitas Kinerja
Analisis pencapaian akuntabilitas kinerja pada dasarnya menggambarkan muatan substansi akuntabilitas kinerja, terutama ditujukan untuk mendapat gambaran yang memadai mengenai hakikat dari akuntabilitas itu sendiri, yaitu mengenai kewajiban untuk memberikan pertanggungjawaban atau untuk menjawab dan menerangkan kinerja tindakan seorang/ badan hukum/ pimpinan kolektif suatu organisasi kepada pihak yang memiliki hak untuk meminta keterangan atau pertanggungjawaban.

2.1.3 Ruang Lingkup Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP)

Ruang lingkup Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP)

berdasarkan Inpres Nomor 7 Tahun 1999 yaitu:

1. Pelaksanaan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah berdasarkan pada seluruh kegiatan utama instansi pemerintah dengan memberikan kontribusi atas pencapaian visi dan misi pemerintah, kegiatan yang menjadi acuan utama seperti:
 - a. Tugas dan Fungsi dari instansi pemerintah
 - b. Program kerja yang menjadi isu nasional

- c. Aktifitas tetap yang menjadi pencapaian vital visi dan misi instansi pemerintah.
2. Ruang lingkup Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dilakukan oleh setiap instansi pemerintah sebagai pertanggung jawaban kepada pemerintah pusat (presiden).

2.1.4 Sasaran Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP)

Sasaran Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) berdasarkan Inpres No. 7 Tahun 1999:

1. Menjadikan instansi pemerintah yang akuntabel sehingga dapat berjalan secara efektif dan efisien serta responsif terhadap aspirasi masyarakat dan lingkungan;
2. Terwujudnya transparansi instansi pemerintah yang baik dan bersih.
3. Terwujudnya partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan nasional yang berintegritas.
4. Meningkatnya rasa kepercayaan masyarakat kepada pemerintah.

2.1.5 Manfaat Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP)

Menurut Ardiansyah (2010:37), manfaat Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) sebagai berikut:

1. Mempertajam penetapan prioritas program-program pembangunan nasional dan daerah.
2. Meminimalisasi duplikasi pembiayaan kegiatan rutin dan pembangunan sekaligus dapat meningkatkan kinerja secara terukur dan berkelanjutan.
3. Tersedianya mekanisme pencatatan pemanfaatan sumber daya nasional dalam pelaksanaan seluruh program dan kegiatan nasional dan daerah secara lebih akurat.
4. Mempercepat dan meningkatkan keakurasian dalam penyusunan, revisi, perhitungan APBN sesuai dengan amanat UU Keuangan Negara.
5. Mencegah penggunaan dana APBN/APBD untuk kegiatan yang tidak dapat dipertanggungjawabkan kepada publik.
6. Tersedianya sarana dan metoda kerja baru baru dalam pengendalian sistem manajemen (*built in control system*) yang lebih handal;

7. Dapat mengurangi jenis dan jumlah laporan yang harus dipersiapkan oleh pejabat disetiap instansi pemerintah, sehingga waktu kerja pimpinan dapat difokuskan untuk peningkatan kinerja instansi sesuai dengan harapan masyarakat.

2.1.6 Keunggulan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP)

Keunggulan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP),
Ardiansyah (2010:37)

1. Menjadi media dan alat dalam laporan pertanggungjawaban instansi pemerintah yang baik kepada Presiden sebagai penanggungjawab penyelenggaraan pemerintahan negara.
2. Sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah pada dasarnya menggunakan pendekatan manajemen strategik dan pengukuran kinerja, sehingga diharapkan dapat mendorong perubahan paradigma penyelenggaraan pemerintahan yaitu antara lain:
3. Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah merupakan upaya pencegah yang terbukti efektif untuk mencegah korupsi, kolusi dan nepotisme.
4. Memudahkan pemerintah pusat seperti presiden untuk menilai kinerja instansi pemerintah secara keseluruhan.
5. Memudahkan Integrasi Sistem Perencanaan Nasional dengan penganggaran, penentuan prioritas pembiayaan program dan kegiatan dasar berdasarkan kinerja setiap instansi pemerintah.
6. Membantu Presiden untuk meningkatkan kualitas Laporan pertanggung jawaban penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan dalam konteks akuntabilitas publik yang lebih transparan sehingga dipercaya oleh masyarakat.

2.1.7 Siklus Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah

Siklus akuntabilitas kinerja instansi pemerintah pada dasarnya berlandaskan pada konsep manajemen berbasis kinerja. Adapun tahapan dalam siklus manajemen berbasis kinerja menurut Rasul dalam Fasti Herianty Akhzan (2010:19),

1. Menetapkan rencana strategik seperti penetapan visi dan misi organisasi.

2. Menetapkan ukuran-ukuran kinerja atas perencanaan stratejik yang sudah ditetapkan dan selanjutnya diikuti dengan pelaksanaan kegiatan organisasi.
3. Mengumpulkan data kinerja (termasuk proses pengukuran kinerja), menganalisis, mereview, dan melaporkan data tersebut.
4. Manajemen organisasi menggunakan data yang dilaporkan tersebut untuk menjadikan acuan perbaikan kinerja, seperti melakukan perubahan dan koreksi atau melakukan penyesuaian (*fine-tuning*) atas kegiatan organisasi. Begitu perubahan, koreksi, dan penyesuaian yang dibutuhkan telah ditetapkan, maka siklus akan berulang lagi.

2.1.8 Pengertian *Good Governance*

Good Governance adalah penyelenggaraan manajemen pembangunan yang solid dan bertanggungjawab yang sejalan dengan demokratisasi pasar dan pasar yang efisien, penghindaran salah alokasi dana investasi yang langka dan pencegahan korupsi, baik secara politik maupun administratif (Jajang dan Irna, 2012).

Dalam Hardiwinoto (2017) menyebutkan bahwa *good governance* merupakan penyelenggaraan pembangunan yang bertanggung jawab yang sejalan dengan prinsip demokrasi yang bertujuan untuk menghindari adanya salah alokasi dana serta menghindari terjadinya korupsi, kolusi dan nepotisme di dalam politik maupun administrasi.

Menurut Santosa dalam Rewansyah (2010:91), sebuah pemerintahan dikatakan baik (*good and sound*) apabila sumber daya dan masalah-masalah publik dikelola secara efektif dan efisien dan merupakan respons terhadap kebutuhan masyarakat. Sementara itu, Keraf dalam Rewansyah (2010:91) mengartikan *good governance* sebagai keberadaan dan berfungsinya beberapa perangkat kelembagaan publik sedemikian rupa sehingga memungkinkan kepentingan masyarakat bisa terjamin dengan baik.

Berdasarkan pengertian *good governance* yang telah dikemukakan di atas dapat disimpulkan *good governance* adalah suatu proses penyelenggaraan pemerintah yang bertanggungjawab kepada publik untuk dapat mengelola dana dan sumber daya untuk kemakmuran bersama secara efektif dan efisien guna menghindari kesalahan dalam pengalokasian dana atau mencegah timbulnya praktek KKN baik secara politik maupun administratif.

2.1.9 Prinsip-prinsip *Good Governance*

Dalam penerapan *Good Governance*, perlu diperhatikan prinsip-prinsip dasar yang telah menjadi pedoman dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah. Sedarmayanti (2012:7) menyebutkan bahwa terdapat empat unsur atau prinsip utama yang dapat memberi gambaran administrasi publik yang bercirikan pemerintahan yang baik (*good governance*) yaitu sebagai berikut:

1. Akuntabilitas, kewajiban bagi setiap aparatur pemerintah untuk bertindak selaku penanggung jawab dan penanggung gugat atas segala tindakan dan kebijakan yang ditetapkannya.
2. Transparansi, pemerintahan yang bersih dan baik akan bersifat transparan terhadap rakyatnya, baik ditingkat pusat maupun daerah.
3. Keterbukaan, menghendaki terbukanya kesempatan bagi seluruh kalangan rakyat untuk mengajukan ataupun memberikan tanggapan dan kritik terhadap pemerintah yang dinilai tidak transparan.
4. Aturan Hukum, pemerintahan yang baik memiliki karakteristik berupaya memberikan jaminan kepastian hukum dan rasa keadilan kepada masyarakat atas setiap kebijakan public yang ditempuh.

2.1.10 Manfaat *Good Governance*

Menurut Hardiwinoto (2017) ada beberapa manfaat yang dirasakan apabila suatu pemerintah menerapkan *good governance* antara lain meliputi:

1. Meningkatkan efisiensi dan produktivitas
Dengan menerapkan prinsip-prinsip penyelenggaraan pemerintah berdasarkan *good governance* pemerintah akan dapat meningkatkan efisiensi dan produktivitas. Hal ini dikarenakan seluruh personil di

pemerintah pada setiap level dan biro akan berusaha menyumbangkan segenap kemampuannya untuk kepentingan pemerintahan dan bukan atas dasar mencari keuntungan secara pribadi, dan atau kelompok. Dengan demikian tidak terjadi pemborosan yang diakibatkan penggunaan sumber daya yang dipergunakan untuk kepentingan pihak tertentu yang tidak sejalan dengan kepentingan pemerintah daerah. Setiap personil pemerintah yang menyumbangkan seluruh kemampuannya didasari kepercayaan bahwa kepala daerah juga melakukan hal sama bagi mereka, yaitu bersikap adil dalam pemberian penghargaan bagi seluruh pihak yang berkepentingan dengan pemerintahan.

2. Meningkatkan kepercayaan publik

Dengan menerapkan prinsip-prinsip *good governance* akan dapat meningkatkan kepercayaan publik. Publik dalam hal ini dapat berupa mitra pemerintah, baik sebagai investor, pemasok, pelanggan, kreditor, maupun masyarakat umum. Bagi investor dan kreditor penerapan *good governance* bagi mitranya adalah suatu hal yang mutlak untuk dijadikan pertimbangan dalam pengambilan keputusan yang berkaitan dengan pelepasan dana investasi maupun kreditnya. Dengan menerapkan prinsip *good governance*, maka baik investor maupun kreditor akan merasa lebih aman karena pemerintah dijalankan dengan prinsip yang mengutamakan kepentingan semua pihak.

3. Menjaga kelangsungan pemerintahan daerah

Dengan menjalankan prinsip-prinsip seperti keadilan, transparansi, dapat dikontrol dan bertanggungjawab, maka kelangsungan pemerintahan dapat dijamin. Dengan prinsip keadilan tidak ada pihak yang istimewa dan tidak istimewa, karena apabila pemerintahan dijalankan dengan tidak adil maka akan menimbulkan pertentangan antara pihak yang berkepentingan dengan pemerintahan sehingga dapat mengancam kewibawaan pemerintah daerah. Prinsip transparansi akan memudahkan semua pihak yang berkepentingan terhadap pemerintah.

4. Dapat mengukur target kinerja pemerintahan daerah

Dengan berpedoman pada prinsip keadilan, transparansi, akuntabilitas dan responsibilitas, maka target kinerja pemerintah dapat lebih diukur dibandingkan dengan bila pemerintahan tidak menerapkan prinsip yang didasarkan pada *good governance*. Dalam hal ini pemerintah lebih terarah mencapai sasaran-sasaran yang telah diprogram, dan tidak disibukkan dengan hal-hal yang tidak menjadi sasaran pencapaian kinerja pemerintahan.

2.1.11 Faktor-faktor yang Mempengaruhi Implementasi *Good Governance*

Faktor-faktor yang mempengaruhi implementasi *good governance* menurut

K.A Tajuddin dalam (Depi Oktia, 2012):

1. Faktor manusia pelaksana (man)
Peran pemerintah seperti pimpinan daerah ataupun Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan pegawai menjadi unsur terpenting dalam mewujudkan pelaksanaan *good governance*.
2. Faktor partisipasi masyarakat (*public participation*)
Partisipasi aktif dari anggota masyarakat juga tidak terlepas dalam mewujudkan pemerintahan yang baik. Masyarakat menjadi peran yang mengkritik pemerintah dalam mempertanggungjawabkan kinerjanya.
3. Faktor keuangan daerah (*funding or budgeting*)
Salah satu kriteria penting untuk mengetahui secara nyata kemampuan daerah dalam mengatur dan mengurus rumah tangganya adalah kemampuan *self supporting* dalam bidang keuangan. Dengan kata lain, faktor keuangan merupakan faktor esensial dalam mengukur tingkat pencapaian *good governance* di daerah atau lokal membutuhkan dana/finansial.

2.1.12 Peranan Pemerintah dalam proses *good governance*

Menurut Santoso (2019:143) peran pemerintah dalam proses *good governance* sebagai berikut:

1. Merumuskan rangkaian tujuan proses pemerintah
2. Merumuskan kebijakan public berdasarkan keinginan dan tuntutan masyarakat
3. Bertanggung jawab dalam implementasi kebijakan, terutama bertanggungjawab dalam hal hasil dan dampaknya terhadap masyarakat
4. Sebagai fasilitator, yakni memudahkan atau menjembatani partisipasi politik ekonomi masyarakat.

2.1.13 Hubungan Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) terhadap *Good Governance*

Dalam Instruksi Presiden No. 7 Tahun 1999 dikatakan bahwa tujuan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) sebagai salah satu prasyarat terciptanya pemerintahan yang baik dan terpercaya (*good governance*). Untuk mewujudkannya adalah dengan mengimplementasikan sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah pada instansi pemerintah.

Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) merupakan serangkaian sistematis atau prosedur yang dijadikan untuk tujuan penetapan dan pengukuran, pengumpulan data, pengklasifikasian, pengikhtisaran, dan pelaporan kinerja instansi pemerintah dalam rangka pertanggungjawaban dan peningkatan kinerja instansi pemerintah.

Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan penerapan *good governance* memiliki keterkaitan yang sangat erat berdasarkan pertimbangan bahwa pelaporan sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah merupakan metode reformasi yang tipikal, sebagai instrument pertanggung jawaban/ tanggung gugat/ kewajiban memberikan jawaban kepada masyarakat untuk bersikap transparan dalam berbagai kegiatan yang telah dilakukan, sebagai salah satu sarana untuk perwujudan *good governance* dan sebagai jawaban atas tantangan akuntansi sektor publik dalam mewujudkan akuntabilitas publik; serta *good governance* merupakan tujuan akhir sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah (LAN dan BPKP, 2000:13 dalam jajang dan Irna, 2012).

Dengan diterapkannya sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah pada instansi pemerintah akan meningkatkan kinerja dan juga dapat menciptakan suatu lingkungan akuntabilitas yang didorong dan dimonitor sehingga akan menciptakan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*), Ati Rosliyati (2014).

2.1.14 Penelitian Terdahulu

Tinjauan dari penelitian terdahulu berupa nama peneliti, tahun penelitian, variabel yang dipergunakan serta hasil penelitiannya dapat dilihat seperti pada tabel berikut:

Tabel 2.1
Penelitian Terdahulu

No	Nama dan Tahun	Judul Penelitian	Hasil Penelitian
1	Ati Rosliyati (2014)	Pengaruh implementasi sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah (SAKIP) terhadap penerapan <i>good governance</i> (studi pada Badan Kepegawaian dan Diklat Daerah Kabupaten Tasikmalaya).	Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah berpengaruh signifikan terhadap penerapan <i>good governance</i> .
2	Jajang Badruzaman dan Irna Chairunnisa (2012)	Pengaruh implementasi sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah (SAKIP) terhadap penerapan <i>good governance</i> (studi pada Dinas Daerah Kabupaten Ciamis).	Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah memberikan pengaruh baik terhadap penerapan <i>good governance</i> .

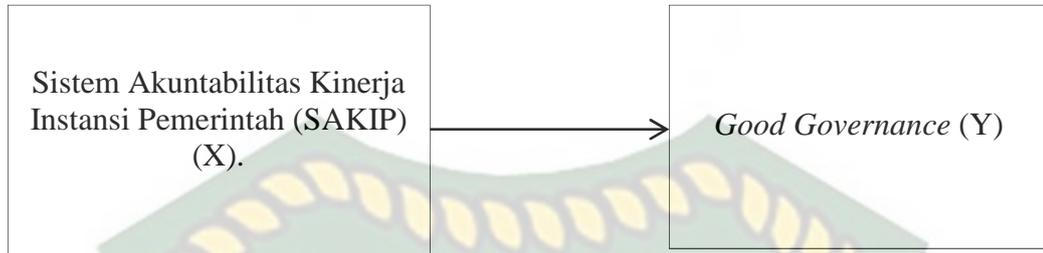
3	Depi Oktia Ruspina (2013)	Pengaruh Kinerja Aparatur Pemerintah daerah, Pengelolaan Keuangan Daerah dan sistem Pengendalian Internal Pemerintah (SPIP) terhadap penerapan <i>good governance</i> (studi Empiris pada Pemerintah Kota Padang).	Hasil penelitian menunjukkan bahwa kinerja aparatur pemerintah daerah, dan pengelolaan keuangan daerah berpengaruh signifikan positif terhadap <i>good governance</i> sedangkan sistem pengendalian internal pemerintah berpengaruh signifikan negatif terhadap penerapan <i>good governance</i> .
4	Cici Apilya (2015)	Pengaruh Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Pengelolaan Keuangan Daerah terhadap <i>Good Governmet Governance</i> studi pada SKPD Kabupaten Rokan Hulu.	Hasil penelitian menunjukkan sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah dan pengelolaan keuangan daerah secara simultan berpengaruh signifikan terhadap <i>good government governance</i> .

Sumber: Data Olahan 2020

2.1.15 Model Penelitian

Berdasarkan pembahasan sebelumnya, maka dapat digambarkan model penelitian sebagai berikut:

Gambar 2.1
Model Penelitian



Sumber: Data Olahan, 2020

2.2 Hipotesis

Berdasarkan perumusan masalah dari landasan teori yang diajukan, maka dapat dirumuskan hipotesis sebagai berikut: “Diduga Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) berpengaruh terhadap penerapan *good governance*.”

BAB III METODE PENELITIAN

3.1 Desain Penelitian

Penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*) yaitu penelitian yang dilakukan secara langsung di lapangan untuk memperoleh data yang diperlukan. Jenis penelitian ini termasuk penelitian kuantitatif yang terdiri dari tahapan identifikasi masalah, studi literatur, pengembangan kerangka konsep, identifikasi dan definisi variable, hipotesis dan pertanyaan penelitian, pengembangan desain penelitian, teknik sampling, pengumpulan data dan menganalisis data serta interpretasi hasil penelitian.

3.2 Objek Penelitian

Penelitian ini dilakukan pada kantor Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Provinsi Riau yang bertempat di Jl. Cut Nyak Dien, jadirejo, Kecamatan Sukajadi, Kota Pekanbaru, Riau. Khususnya pada Bagian Internal (Pegawai).

3.3 Definisi Variabel Penelitian

Sesuai dengan hipotesis yang diteliti “Pengaruh Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) terhadap penerapan *Good Governance* pada Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Riau”, maka terdapat dua variabel dalam penelitian ini yaitu variabel variabel independen (X) dan variabel dependen (Y).

Adapun variabel yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

1. Variabel Bebas (*Independent Variabel*)

Variabel bebas adalah variabel yang mempengaruhi atau menjadi penyebab besar kecilnya nilai variabel yang lain (Suliyanto, 2011:7), dalam penelitian ini yang menjadi variabel independen yaitu sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah. Terdapat lima indikator pengukuran Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah yaitu, 1) rencana strategis/ renstra, 2) rencana kinerja, 3) pengukuran kinerja, 4) evaluasi kinerja dan 5) analisis akuntabilitas kinerja, LAN & BKP dalam Jajang dan Irna (2012).

Dalam penelitian ini pengukuran terhadap seorang responden yaitu dengan sebuah kuesioner yang bersumber dari Mawarni Berutu (2015) yang berisi pernyataan-pernyataan yang kemudian diminta untuk memberikan jawaban “sangat setuju” sampai dengan “sangat tidak setuju”. Jawaban-jawaban ini diberikan skor 1 sampai 5.

2. Variabel Terikat (*Dependent Variabel*)

Variabel terikat adalah variabel yang variasinya dipengaruhi oleh variasi variabel independen (Suliyanto, 2011:8). Dalam penelitian ini yang menjadi variabel dependen yaitu *Good Governance*. Menurut Sedarmayanti (2012:7) terdapat empat indikator *Good Governance* yaitu, 1) akuntabilitas, 2) transparansi, 3) keterbukaan, dan 4) aturan hukum.

Dalam penelitian ini pengukuran terhadap seorang responden dengan sebuah kuesioner yang bersumber dari Depi Oktia Ruspina (2013) yang berisi pernyataan-pernyataan yang kemudian diminta untuk memberikan jawaban

“sangat setuju” sampai dengan “sangat tidak setuju”. Jawaban-jawaban ini diberikan skor 1 sampai 5.

Tabel 3.1
Definisi Operasional Variabel Penelitian

Variabel	Definisi Operasional	Indikator	Skala
Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) (X)	Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) merupakan rangkaian sistematis dari berbagai aktivitas, alat, dan prosedur yang dirancang untuk tujuan penetapan dan pengukuran pengumpulan data, pengklasifikasian, pengikhtisaran, dan pelaporan kinerja pada instansi pemerintah, dalam rangka pertanggungjawaban dan peningkatan kinerja instansi pemerintah. (Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014)	<ol style="list-style-type: none"> 1. Rencana strategis/ renstra 2. Rencana kerja 3. Pengukuran kinerja 4. Evaluasi kinerja 5. Analisis akuntabilitas kinerja <p>(LAN & BPKP dalam Jajang dan Irna 2012)</p>	Likert
Good Governance (Y)	Good Governance merupakan suatu penyelenggaraan pembangunan pemerintahan yang bertanggungjawab yang sesuai dengan prinsip demokrasi yang bertujuan untuk menghindari salah alokasi dana ataupun menghindari terjadinya korupsi, kolusi dan nepotisme. (Hardiwinoto, 2017)	<ol style="list-style-type: none"> 1. Akuntabilitas 2. Transparansi 3. Keterbukaan 4. Aturan Hukum <p>(Sedarmayanti, 2012:7)</p>	Likert

Sumber: Data Olahan 2020

3.4 Populasi dan Sampel

3.4.1 Populasi

Populasi adalah keseluruhan jumlah yang terdiri atas obyek atau subyek yang mempunyai karakteristik dan kualitas tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk diteliti dan kemudian ditarik kesimpulannya, Sujarweni (2019:65).

Dalam penelitian ini yang menjadi populasi yang penulis teliti yaitu Pegawai Negeri Sipil yang bekerja di Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Riau sebanyak 120 orang.

3.4.2 Sampel

Sampel adalah bagian dari sejumlah karakteristik yang dimiliki oleh populasi yang digunakan untuk penelitian. Bila populasi besar, peneliti tidak mungkin mengambil semua untuk penelitian karena terbatasnya dana, tenaga, dan waktu. Sampel yang diambil dari populasi harus betul-betul mewakili dan harus valid, Sujarweni (2019:65)

Teknik penarikan sampel dalam penelitian ini adalah menggunakan teknik *sampling purposive* yaitu teknik penentuan sampel dengan pertimbangan tertentu, disesuaikan dengan tujuan dan masalah penelitian. Dalam penelitian ini yang menjadi sampel untuk diteliti adalah bagian yang berkaitan dengan sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah dan *good governance* yaitu Pegawai Negeri Sipil.

Tabel 3.2
Bidang yang diteliti

No	Bagian	Jumlah (Orang)
1	Bidang Perencanaan dan Program	8
2	Bidang Anggaran Daerah	8
3	Bidang Perbendaharaan dan Kas	8
4	Bidang Akuntansi dan Pelaporan	8
	Jumlah	32

Sumber: Data Olahan, 2020

3.5 Jenis dan Sumber Data

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu data primer dan data sekunder. Data primer adalah data yang dikumpulkan oleh peneliti secara langsung dari sumbernya atau responden yang berupa kuesioner. Data sekunder adalah data yang diperoleh oleh peneliti secara tidak langsung, dalam hal ini yang menjadi data sekunder dalam penelitian ini adalah berupa struktur organisasi dan dokumen yang berkaitan dengan system akuntabilitas kinerja instansi pemerintah dan *good governance*.

3.6 Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data untuk penelitian ini dilakukan dengan teknik kuesioner yaitu dengan memberikan seperangkat pertanyaan atau pernyataan tertulis kepada responden untuk dijawab, dan kuesioner tersebut akan diantar langsung ke responden dengan dipandu oleh peneliti dengan menjelaskan item-item pertanyaan kepada responden pada saat pengisian kuesioner tersebut dilakukan. Skala yang digunakan dalam penelitian ini adalah Skala Likert.

Tabel 3.3
Instrumen Skala Likert

No	Pernyataan	Skor
1	Sangat Setuju (SS)	5
2	Setuju (S)	4
3	Netral (N)	3
4	Tidak Setuju (TS)	2
5	Sangat Tidak Setuju (STS)	1

Sumber: Suliyanto (2011:10)

Kemudian untuk analisis data dapat digunakan dua alternative analisis dengan hasil yang sama yaitu dengan melakukan Analisis Interpretasi Rata – rata Skor. Dalam analisis ini ditentukan kriteria interpretasi skor yang diawali dengan menentukan interval kelas dari setiap gradian (alternative jawaban yang disebut dengan kategori) dengan rumus:

$$CI = \text{Range} - C$$

Keterangan:

CI : Interval Kelas

Range : Skor tertinggi – Skor terendah

C : Jumlah Kelas

Dengan demikian interval kelasnya sebagai berikut:

$$CI = (5 - 1) / 5 = 0,08$$

Kemudian disusun tabel kriteria interpretasi berikut:

Tabel 3.4
Kategori Berdasarkan Interval Skor

No	Rata – rata skor	Keterangan
1	4,2 – 5,0	Sangat Baik
2	3,4 – 4,1	Baik
3	2,6 – 3,3	Cukup Baik
4	1,9 – 2,5	Tidak Baik
5	1,0 – 1,8	Sangat Tidak Baik

Sumber: Sugiyono, (2017)

3.7 Uji Kualitas Data

Ketepatan pengujian suatu hipotesis sangat tergantung dari kualitas data yang dipakai dalam pengujian tersebut. Kualitas data penelitian ditentukan oleh kualitas instrumen yang digunakan untuk mengumpulkan data (Sugiyono, 2016:153). Uji kualitas data meliputi uji validitas dan uji reliabilitas. Untuk menentukan uji validitas dan uji reliabilitas, peneliti menggunakan perhitungan dengan bantuan SPSS (*Statistical Package For Social Scieces*) untuk memperoleh hasil yang terarah.

3.7.1 Uji Instrumen Penelitian

3.7.1.1 Uji Validitas

Untuk mendukung analisis regresi dilakukan uji validitas dari reliabilitas. Menurut sugiyono (2011:173), instrumen utama yang digunakan dalam penelitian ini adalah daftar pertanyaan yang disebarkan kepada responden uji validitas. Dalam penelitian ini digunakan untuk menguji kevalidan kuesioner. Uji validitas dilakukan dengan *corrected item correlation* dengan spss ini merupakan salah satu dari beberapa cara pengujian validitas instrumen penelitian.

Pada penelitian ini uji validitas akan dilakukan dengan bantuan program SPSS (*Statistical Package For Social Scieces*). Kriteria penilaian uji validitas menurut Sujarweni (2014:83) adalah:

- a) Apabila $r \text{ hitung} > r \text{ tabel}$, maka item kuesioner tersebut valid.
- b) Apabila $r \text{ hitung} < r \text{ tabel}$, maka dapat dikatakan item kuesioner tidak valid.

3.7.1.2 Uji Reliabilitas

Menurut Sujarweni (2014:85) uji reliabilitas merupakan ukuran suatu kestabilan dan konsisten responden dalam menjawab hal yang berkaitan dengan konstruk-konstruk pertanyaan yang merupakan dimensi suatu variabel dan disusun dalam suatu bentuk kuesioner.

Untuk mengetahui kuesioner tersebut sudah reliabel akan dilakukan pengujian reliabilitas kuesioner dengan bantuan program SPSS. Kriteria penilaian uji reliabilitas adalah:

- a) Apabila hasil koefisien Alpha lebih besar dari taraf signifikansi 60% atau 0,60 maka kuesioner tersebut reliabel.
- b) Apabila hasil koefisien Alpha lebih kecil dari taraf signifikansi 60% atau 0,60 maka kuesioner tersebut tidak reliabel.

3.7.1.3 Uji Normalitas Data

Uji normalitas bertujuan untuk menilai sebaran data pada sebuah kelompok data atau variabel, apakah sebaran data tersebut berdistribusi normal ataukah tidak. Uji normalitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi, variabel pengganggu atau residual memiliki distribusi normal. Seperti diketahui bahwa uji t dan f mengasumsikan bahwa nilai residual mengikuti distribusi normal. Kalau asumsi ini dilanggar maka uji statistik menjadi tidak valid untuk jumlah sampel yang kecil. Ada dua cara untuk mendeteksi apakah residual berdistribusi normal atau tidak yaitu dengan analisis grafik dan uji statistik. Pengujian dengan menggunakan uji statistik *One Sample Kolmogorov-Smirnov*

Test (K-S). Jika nilai probabilitas signifikan K-S lebih besar dari 0.05, maka data berdistribusi normal (Ghozali, 2013:78).

3.8 Teknik Analisis Data

Metode analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis regresi linear sederhana. Menurut Sugiyono (2014:270) regresi sederhana didasarkan pada hubungan ataupun kausal satu variabel independen dengan satu variabel dependen.

Persamaan umum regresi linear sederhana adalah:

$$Y = a + bX$$

Keterangan:

$Y = \textit{Good Governance}$

$X = \textit{Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP)}$

$a = \textit{Konstanta}$

$b = \textit{Koefisien regresi}$

3.9 Pengujian Hipotesis

3.9.1 Pengujian Secara Parsial (Uji t)

Tujuan dari uji parsial adalah untuk mengetahui seberapa jauh pengaruh dari variabel independen (X) terhadap variabel dependen (Y) secara parsial. Menurut Suharyadi dan Purwanto (2013:228) menjelaskan langkah yang diperlukan untuk pengujian hipotesis akan dilakukan yaitu:

1. Menggunakan tingkat signifikansi sebesar 0,05 (=5%) atau tingkat keyakinan sebesar 0,95. Hipotesis rumuskan sebagai berikut:

$$H_0: b_i = 0$$

$H_a: \beta_1 \neq 0$

Ketentuan dalam pengujian ini adalah sebagai berikut:

- a) Jika tingkat signifikansi $\leq 5\%$, H_0 ditolak dan H_a diterima
 - b) Jika tingkat signifikansi $> 5\%$, H_0 diterima dan H_a ditolak.
2. Menentukan nilai t tabel dengan rumus $N = n - k$ dan taraf nyata α .
 3. Menentukan nilai t hitung dengan rumus.
 4. Menentukan daerah keputusan. Daerah keputusan untuk menerima H_0 atau menolak H_0 . Dengan kriteria hipotesis, yaitu:

t hitung \geq tabel, dengan 5% maka H_0 ditolak, artinya signifikansi.

t hitung $<$ tabel, dengan 5% maka H_0 diterima, artinya tidak signifikan.

3.10 Koefisien Determinasi

Menurut Imam Ghozali (2011:97) Koefisien determinasi (R^2) pada intinya mengukur seberapa jauh kemampuan model dalam menerangkan variasi variabel dependen. Nilai koefisien determinasi adalah antara nol dan satu. Nilai R^2 yang kecil berarti kemampuan variabel-variabel independen dalam menjelaskan variasi variabel dependen amat terbatas. Nilai yang mendekati satu berarti variabel-variabel independen memberikan hampir semua informasi yang dibutuhkan untuk memprediksi variasi variabel dependen.

Menurut Trijono (2015:77), Jika R^2 semakin besar atau mendekati 1, maka model sudah tepat. Untuk data survei yang bersifat *cross section* data yang diperoleh dari responden pada waktu yang sama, maka R^2 0,2 atau 0,3 sudah cukup baik.

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

4.1 Gambaran Umum Objek Penelitian

4.1.1 Sejarah Singkat

Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Provinsi Riau adalah Perangkat Daerah Provinsi Riau yang ditetapkan melalui Peraturan Daerah (Perda) Provinsi Riau Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Riau yang disusun berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah.

Selaku Perangkat Daerah yang berbentuk Badan, BPKAD berada bertanggung jawab kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah, dengan tugas pokok menyelenggarakan perumusan kebijakan, koordinasi, fasilitasi, pemantauan, evaluasi dan pelaporan pada sekretariat, Bidang Perbendaharaan dan Kas Daerah, Bidang Akuntansi dan Pelaporan, Bidang Anggaran Daerah dan Bidang Pengelolaan Barang Milik Daerah serta menyelenggarakan kewenangan yang dilimpahkan Pemerintah kepada Gubernur sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan.

4.1.2 Visi dan Misi

4.1.2.1 Visi

“Terwujudnya Riau yang Berdaya Saing, Sejahtera, Bermanfaat dan Unggul di Indonesia (Riau Bersatu).”

4.1.2.2 Misi

1. Mewujudkan sumber daya manusia yang beriman, berkualitas dan berdaya saing global melalui pembangunan manusia seutuhnya.

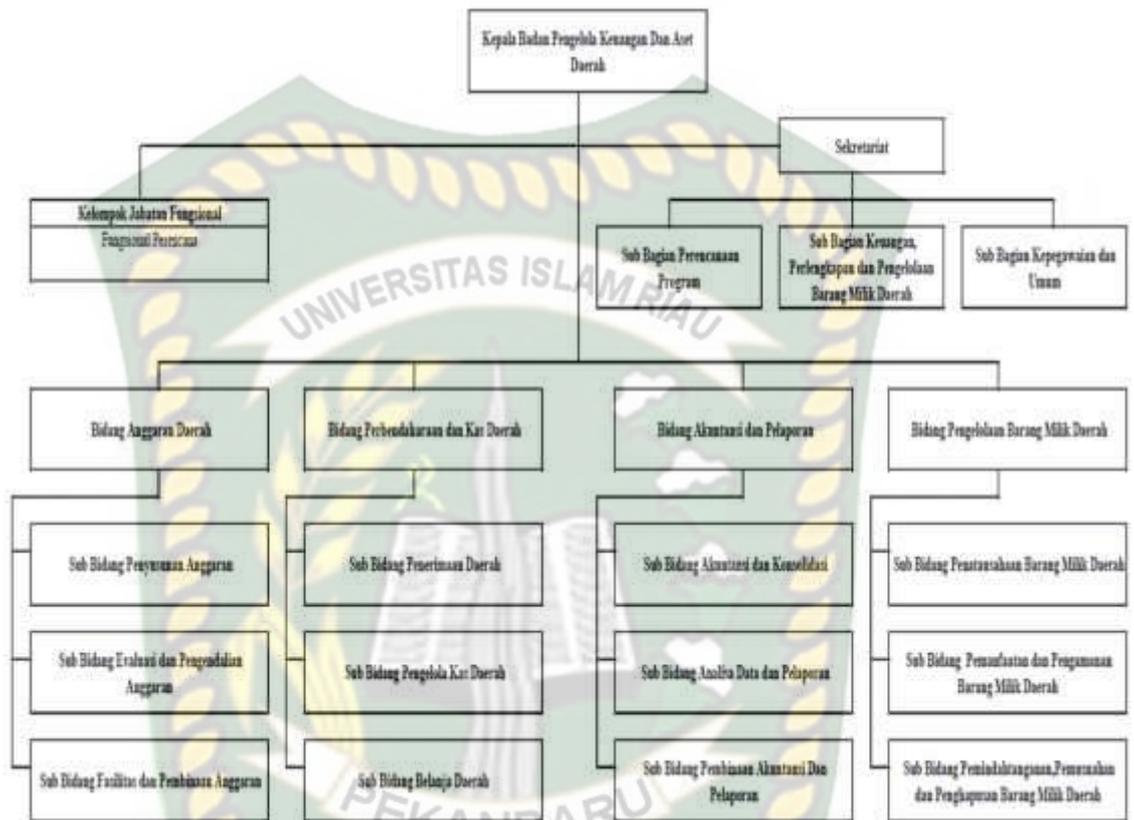
2. Mewujudkan pembangunan infrastruktur daerah yang merata, berwawasan lingkungan dan berkelanjutan.
3. Mewujudkan pembangunan ekonomi yang inklusif, mandiri dan berdaya saing.
4. Mewujudkan budaya Melayu sebagai payung negeri dan mengembangkan pariwisata yang berdaya saing.
5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dan pelayanan publik yang prima berbasis teknologi informasi.

4.1.3 Struktur Organisasi

Struktur organisasi merupakan gambaran tentang kerangka dan susunan perwujudan dari hubungan diantara fungsi, bagian posisi maupun orang yang menunjukkan kedudukan, tugas, wewenang, kewajiban dan tanggung jawab bagi masing-masing anggota organisasi. Dengan terciptanya struktur organisasi yang baik akan tercipta juga suatu kerjasama yang harmonis antara sesama anggota organisasi sehingga tujuan perusahaan yang telah ditetapkan sebelumnya akan tercapai sesuai harapan masing-masing anggota perusahaan.

Struktur Organisasi Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 92 Tahun 2016 tentang kedudukan, Susunan Organisasi Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Riau sebagai berikut:

Gambar 4.1
Struktur Organisasi



Sumber : BPKAD Provinsi Riau, 2020

Uraian tugas dari masing-masing satuan organisasi Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Riau sebagai berikut:

1. Sekretariat

Tugas:

Menyelenggarakan urusan pada Subbagian Perencanaan Program, Subbagian Keuangan dan Perlengkapan dan Subbagian Umum.

Susunan Organisasi Sekretariat, terdiri dari:

1) Subbagian Perencanaan Program.

Tugas:

- a. Melakukan pembinaan dan memberikan petunjuk teknis mengenai penyusunan rencana program dan laporan;
- b. Memfasilitasi tindak lanjut laporan hasil pemeriksaan;
- c. Melaksanakan penyusunan renstra dan lakip;
- d. Mengelola sistem informasi keuangan daerah;

2) Subbagian Keuangan dan Perlengkapan

Tugas:

- a. Menghimpun peraturan perundang-undangan, pedoman, petunjuk teknis dan petunjuk pelaksanaan pengelolaan keuangan dan aset;
- b. Menghimpun bahan dan mengumpulkan data usul rencana keuangan dan aset;
- c. Melakukan urusan pembendaharaan, serta verifikasi dan administrasi pengelola keuangan dan asset;
- d. Mengelola tata usaha keuangan dan aset penyiapan pembayaran gaji pegawai;
- e. Melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan kegiatan pengelola keuangan dan aset;

3) Subbagian Umum dan Kepegawaian

Tugas:

- a. Menggandakan dan mendistribusikan surat menyurat;

- b. Mengumpulkan data dan menyiapkan bahan usul kenaikan pangkat, kenaikan gaji berkala, pensiun, pemberian penghargaan, penempatan formasi, kesejahteraan pegawai, mutasi, pemberhentian pegawai, diklat, ujian diklat, ujian dinas, izin belajar, pembuatan kartu pegawai (KARPEG), asuransi kesehatan (ASKES), TASPEN, Kartu Istri/Suami (Karis/Karsu);
- c. Menyelenggarakan urusan kehumasan dan mengatur fasilitas rapat, pertemuan dan upacara serta kegiatan keprotokolan dan administrasi perjalanan dinas;
- d. Mengumpulkan, menyusun dan mengolah bahan data informasi untuk kepentingan masyarakat;

2. Bidang Perbendaharaan dan Kas

Tugas:

Menyelenggarakan urusan pada Subbidang Penerimaan Kas daerah dan Subbidang Pengeluaran Kas Daerah.

Susunan Organisasi Bidang Perbendaharaan Kas Daerah, terdiri dari:

1) Subbidang Penerimaan Kas daerah

Tugas:

- a. Meneliti dan memeriksa dokumen atau bukti penerimaan uang daerah dan penatausahaan data transfer daerah sesuai dengan rekening kas umum daerah;
- b. Melakukan pembukuan dan pengadministrasian penerimaan berupa kas dan setara kas;

- c. Memeriksa, menganalisis dan mengevaluasi pertanggung jawaban pendapatan/penerimaan kas;
- d. Menyusun dan menyediakan laporan penerimaan kas;
- e. Melaksanakan rekonsiliasi data penerimaan kas dengan satuan kerja perangkat daerah terkait dalam rangka penyusunan posisi kas;
- f. Menjalankan koordinasi dan sinkronisasi penerimaan kas dengan pengeluaran kas daerah serta dengan fungsi lainnya secara berkala;
- g. Melaksanakan pengelolaan utang dan piutang daerah;
- h. Menyusun dan menyiapkan anggaran kas penerimaan daerah;

2) Subbidang Pengeluaran Kas Daerah

Tugas:

- a. Menyiapkan dokumen penetapan uang persediaan SKPD;
- b. Menyiapkan dokumen penetapan surat penyediaan dana (SPD);
- c. Menyiapkan dokumen penetapan surat perintah pencairan dana (SP2D);
- d. Menyusun laporan keuangan PPKD/BUD;
- e. Meneliti kelengkapan dokumen dan penerbitan SKPP;
- f. Mengecek dokumen atau bukti pengeluaran uang daerah dan penatausahaan data transfer daerah sesuai dengan rekening kas umum daerah;
- g. Melakukan pembukuan dan pengadministrasian pengeluaran daerah yang berupa kas dan setara kas dalam bentuk kas;
- h. Memeriksa, menganalisis dan mengevaluasi pertanggungjawaban pengeluaran kas;

- i. Melakukan pengawasan dan evaluasi kegiatan pada Subbidang Pengeluaran Kas;

3. Bidang Pembinaan dan Evaluasi APBD Kab/Kota

Tugas:

Menyelenggarakan urusan pada Subbidang Pembinaan dan Evaluasi APBD Kab/Kota dan Subbidang Evaluasi Pertanggungjawaban APBD Kab/Kota.

Susunan Organisasi Bidang Pembinaan dan Evaluasi APBD Kab/Kota, terdiri dari:

1) Subbidang Pembinaan dan Evaluasi APBD Kab/Kota.

Tugas:

- a. Mengelola administrasi, menyusun dan melaksanakan program kerja Subbidang Pembinaan dan Evaluasi Kab/Kota;
- b. Menyiapkan/ mengumpulkan bahan dalam rangka pelaksanaan evaluasi Ranperda APBD, Ranperda Perubahan APBD Kab/Kota;
- c. Menyiapkan bahan untuk pelaksanaan monitoring tindak lanjut atas keputusan Gubernur tentang hasil evaluasi Ranperda APBD, Ranperda Perubahan APBD;
- d. Memberikan pelayanan administrasi, informasi, dan fasilitasi Pengelolaan keuangan Kabupaten/Kota;
- e. Menghimpun dan mengolah data keuangan Kabupaten/Kota;

2) Subbidang Pertanggungjawaban APBD Kab/Kota.

Tugas:

- a. Mengelola administrasi, menyusun dan melaksanakan program kerja Subbidang Evaluasi Pertanggungjawaban APBD Kab/Kota;
- b. Menyiapkan/ mengumpulkan bahan untuk pelaksanaan monitoring tindak lanjut atas keputusan Gubernur tentang hasil evaluasi Ranperda Pertanggungjawaban APBD Kab/Kota;
- c. Menyiapkan bahan dalam rangka pembinaan, asistensi, supervisi, dan monitoring penyusunan laporan keuangan Kab/Kota;
- d. Menyiapkan bahan pengolahan data pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Kab/Kota;
- e. Menghimpun data laporan periodik pelaksanaan APBD Kab/Kota;

4. Bidang Akuntansi dan Pelaporan

Tugas:

Menyelenggarakan urusan pada Subbidang Akuntansi dan Konsolidasi dan Subbidang Analisa Data dan Pelaporan.

Susunan Organisasi Bidang Akuntansi dan Pelaporan terdiri dari:

1) Subbidang Akuntansi dan Konsolidasi

Tugas:

- a. Mengelola administrasi dan menyusun program kerja Subbidang Akuntansi dan Konsolidasi LPJ SKPD;
- b. Melakukan konsolidasi pelaporan keuangan dalam rangka pertanggungjawaban pelaksanaan APBD;

- c. Melakukan konsolidasi dan rekonsiliasi laporan keuangan entitas akuntansi;
- d. Menyusun laporan keuangan pemerintah daerah yang terdiri dari Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Arus Kas dan Catatan Atas Laporan Keuangan;
- e. Melaksanakan penyesuaian dan harmonisasi sesuai kondisi dan kebutuhan pelaporan keuangan pemerintah daerah;

2) Subbidang Analisa Data dan Pelaporan

Tugas:

- a. Menyiapkan bahan penyusunan sistem dan prosedur akuntansi;
- b. Mengumpulkan, mengidentifikasi dan menganalisa bahan penyusunan laporan keuangan;
- c. Mengkoordinir SKPD untuk menyusun laporan semester pertama dan prognosis;
- d. Menyusun laporan semester pertama dan prognosis 6 bulan berikutnya;
- e. Melaksanakan pembinaan dan pengendalian atas pelaksanaan akuntansi dan pelaporan pada SKPD;

5. Bidang Anggaran Daerah

Tugas:

Menyelenggarakan urusan pada Subbidang Penyusunan Anggaran dan Subbidang Evaluasi dan Pengendalian Anggaran.

Susunan Organisasi Bidang Anggaran Daerah, terdiri dari:

1) Subbidang Penyusunan Anggaran

Tugas:

- a. Melaksanakan review atas usulan rencana kerja dan anggaran dan rancangan DPA-SKPD/SKPKD;
- b. Meneliti dan mengevaluasi rancangan anggaran kas pendapatan dan belanja langsung SKPD/SKPKD;
- c. Melaksanakan penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah, Nota Keuangan dan Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah/Perubahan APBD;
- d. Melakukan pengawsan dan evaluasi kegiatan pada Subbidang Penyusunan Anggaran;
- e. Menyiapkan bahan dan data serta menyusun dan menyampaikan laporan pelaksanaan tugas pokok Subbidang Penyusunan Anggaran;

2) Subbidang Evaluasi dan Pengendalian Anggaran

Tugas:

- a. Menyelenggarakan pengendalian APBD sesuai dengan ukuran, kompleksitas dan sifat dari tugas dan fungsi sesuai peraturan dan perundang-undangan yang berlaku;
- b. Menyusun Standar Biaya Umum Belanja Langsung maupun Belanja Tidak Langsung;
- c. Menyiapkan dan menyusun pergeseran anggaran pendapatan dan belanja langsung;

- d. Menyiapkan bahan dan analisis usulan revisi dokumen pelaksanaan anggaran (DPA) dan dokumen pelaksanaan anggaran lanjutan (DPA-L);
- e. Mengumpulkan bahan dan sumber data APBD sebagai dasar menyusun dan mengendalikan anggaran pendapatan dan belanja daerah;

6. Bidang Administrasi dan Analisa Kebutuhan Aset:

Tugas:

Bidang Administrasi dan Analisa Kebutuhan Aset mempunyai tugas pokok menyelenggarakan urusan pada Subbidang Administrasi Aset dan Subbidang Analisa Kebutuhan Aset.

Susunan Organisasi Bidang Administrasi dan Analisa Kebutuhan Aset, terdiri dari:

1) Subbidang Administrasi Aset

Tugas:

- a. Meneliti laporan daftar inventarisasi barang dan rekapitulasi daftar inventarisasi barang Pemerintah daerah persemester / pertahun anggaran;
- b. Mempersiapkan bahan-bahan penyusunan rekapitulasi induk daftar mutasi barang Pemerintah daerah persemester / pertahun anggaran;
- c. Mengumpulkan dan meneliti daftar hasil pengadaan dan pemeliharaan/perbaikan barang Pemerintah Daerah pertahun anggaran;
- d. Menyusun daftar rekapitulasi hasil pengadaan dan pemeliharaan/ perbaikan barang pemerintah daerah pertahun anggaran;
- e. Mengumpulkan laporan hasil pengadaan dan pemeliharaan/ perbaikan pada unit Pemerintah Provinsi Riau;

2) Subbidang Analisa Kebutuhan Aset

Tugas:

- a. Menyusun program kebutuhan barang pakai habis, barang inventaris dan pemeliharaan;
- b. Menyusun anggaran belanja kebutuhan barang milik Pemerintah Provinsi Riau;
- c. Melakukan evaluasi perencanaan kebutuhan barang dan perencanaan pemeliharaan barang milik unit;
- d. Melakukan evaluasi kebutuhan barang pakai habis, barang inventaris dan pemeliharaan;
- e. Mengevaluasi anggaran belanja kebutuhan dan pemeliharaan barang;
- f. Mengevaluasi kebutuhan aset milik Pemerintah Provinsi Riau;

7. Bidang Pengadaan dan Pemeliharaan Aset

Tugas:

Bidang Pengadaan dan Pemeliharaan Aset mempunyai tugas pokok menyelenggarakan urusan pada Subbidang Pengadaan Aset dan Subbidang Pemeliharaan Aset.

Susunan Organisasi Bidang Pengadaan dan Pemeliharaan Aset, terdiri dari:

1) Subbidang Pengadaan Aset

Tugas:

- a. Melakukan analisa terhadap rencana pengadaan aset;
- b. Mengevaluasi administrasi pengadaan aset;

- c. Menginventarisasi kebutuhan sesuai bidang tugas pokok Subbidang Pengadaan secara rutin maupun berkala sebagai bahan dasar pemecah masalah;
- d. Membuat laporan pengadaan barang kepada atasan:

2) Subbidang Pemeliharaan Aset

Tugas:

- a. Melaksanakan pekerjaan Pemeliharaan Aset;
- b. Melakukan Pengawasan Pemeliharaan Aset;
- c. Mempersiapkan bahan dan mengkoordinir usulan pemeliharaan aset;
- d. Melaporkan hasil pelaksanaan tugas dan kegiatan kepada Kepala Bidang Pengadaan dan Pemeliharaan Aset secara periodik sebagai bahan pertanggungjawaban.

4.2 Hasil Penelitian

Berdasarkan hasil pengumpulan data yang diperoleh melalui kuesioner yang diberikan kepada Pegawai Negeri Sipil Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Riau sebagai responden, maka dapat diketahui karakteristik setiap responden. Hal ini dilakukan untuk guna memperoleh informasi agar dapat menjadi masukan bagi Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Riau dalam upaya peningkatan kinerja karyawan. Analisis data yang digunakan adalah Uji Validitas, Uji Reliabilitas, Analisis regresi linier sederhana, Uji Asumsi klasik, Uji t dan Koefisien determinasi (R^2) dengan menggunakan alat bantu SPSS versi 20.

4.2.1 Karakteristik Responden

Karakteristik responden digunakan untuk mengetahui karakteristik-karakteristik Pegawai Negeri Sipil yang menjadi responden. Dibawah ini adalah karakteristik responden berdasarkan kuesioner yang telah diisi oleh responden dengan penjelasan sebagai berikut:

4.2.1.1 Karakteristik Responden Berdasarkan Jenis Kelamin

Jenis kelamin menjadi salah satu unsur yang penting dalam penentuan perekrutan pegawai untuk menduduki jabatan yang tersedia. Karakteristik responden berdasarkan jenis kelamin dapat dilihat sebagai berikut:

Tabel 4.1
Responden Berdasarkan Jenis Kelamin

No	Jenis Kelamin	Jumlah (Orang)	Persentase (%)
1	Laki-Laki	17	53
2	Perempuan	15	47
Jumlah		32	100

Sumber: Data Olahan, 2020

Berdasarkan Tabel 4.1 menunjukkan bahwa jumlah pegawai negeri sipil yang berjenis kelamin laki-laki sebanyak 17 orang atau sebesar 53%, sedangkan untuk pegawai negeri sipil yang berjenis kelamin perempuan berjumlah sebanyak 15 orang atau sebesar 47%. Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa pegawai negeri sipil yang berjenis kelamin laki-laki lebih mendominasi, hal ini dikarenakan laki-laki memiliki fisik yang kuat bila dibandingkan dengan perempuan (Herawati, 2013).

4.2.1.2 Karakteristik Responden Berdasarkan Usia

Usia menjadi salah satu bentuk klasifikasi menentukan tempat dalam jabatan karena berpengaruh dalam emosional dalam penentuan pengambilan

keputusan. Adapun karakteristik responden berdasarkan usia dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 4.2
Responden Berdasarkan Usia

No	Usia (Tahun)	Jumlah (Orang)	Persentase (%)
1	17 - 25	0	0
2	26 - 35	18	56
3	36 - 45	9	28
4	46 - 55	5	16
Jumlah		32	100

Sumber: Data Olahan, 2020

Berdasarkan tabel 4.2 menjelaskan bahwa jumlah pegawai negeri sipil terbanyak pada usia 26 – 35 tahun yang berjumlah 18 orang dengan tingkat persentase 56% dan yang paling sedikit pada usia 46 – 55 tahun berjumlah 5 orang dengan tingkat persentase sebesar 16%. Menurut Mahendra dan Woyanti (2014) usia yang masih dalam masa produktif biasanya mempunyai tingkat produktivitas lebih tinggi dibandingkan dengan tenaga kerja yang sudah berusia tua sehingga fisik yang dimiliki menjadi lemah dan terbatas.

4.2.1.3 Karakteristik Responden Berdasarkan Tingkat Pendidikan

Semakin tinggi tingkat pendidikan pegawai semakin bijak dalam bertindak dan mengambil keputusan, karakteristik responden berdasarkan pendidikan dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 4.3
Responden Berdasarkan Tingkat Pendidikan

No	Pendidikan	Jumlah (Orang)	Persentase (%)
1	SMA/SMK	0	0
2	Diploma	6	19
3	Sarjana	26	81
Jumlah		32	100

Sumber: Data Olahan, 2020

Berdasarkan tabel 4.3 diperoleh data karakteristik responden berdasarkan tingkat pendidikan dimana yang paling dominan yaitu sarjana dengan jumlah 26 orang dengan tingkat persentase 81%. Sedangkan untuk tingkat pendidikan Diploma berjumlah 6 orang dengan tingkat persentase 19%. Menurut Suyono dan Hermawan (2013) menyatakan terdapat pengaruh pendidikan terhadap produktivitas tenaga kerja. Hal ini menunjukkan bahwa semakin tinggi tingkat pendidikan seseorang maka akan semakin tinggi produktivitas kerjanya sebab orang tersebut akan memiliki wawasan dan pengetahuan yang lebih luas begitupun sebaliknya.

4.2.1.4 Karakteristik Responden Berdasarkan Masa Kerja

Masa kerja seseorang dapat mempengaruhi kinerjanya. Karakteristik responden berdasarkan masa kerja dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 4.4
Responden Berdasarkan Masa Kerja

No	Masa Kerja	Jumlah (Orang)	Persentase (%)
1	1 - 5 Tahun	2	6
2	6 - 10 Tahun	22	69
3	> 10 Tahun	8	25
Jumlah		32	100

Sumber: Data Olahan, 2020

Berdasarkan tabel 4.4 diperoleh data karakteristik responden berdasarkan masa kerja tertinggi adalah 6 – 10 tahun yang berjumlah 22 orang dengan tingkat persentase 69%, Sedangkan masa kerja terendah adalah 1-5 tahun dengan tingkat persentase 6%. Menurut Pamungkas (2017) semakin lama masa kerja seorang tenaga kerja maka keterampilan dan kemampuan dalam melakukan pekerjaan semakin meningkat. Pengalaman seseorang melaksanakan pekerjaan secara terus menerus mampu meningkatkan kedewasaan teknisnya.

4.2.2 Hasil Analisis Deskriptif

Analisis deskriptif dimaksudkan untuk mendapat gambaran/deskripsi mengenai tanggapan dari responden mengenai variabel-variabel yang terdapat dalam penelitian. Variabel dalam penelitian ini terdiri dari satu variabel bebas, yaitu sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah (SAKIP) (X) dan satu variabel terikat yaitu *Good Governance* (Y).

4.2.2.1 Tanggapan Responden Terhadap Variabel sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah (SAKIP) (X)

Variabel sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah (SAKIP) memiliki lima indikator, setiap indikator memiliki dua pernyataan. Sehingga total keseluruhan pernyataan pada variabel SAKIP ada sepuluh pernyataan. Adapun rekapitulasi hasil jawaban responden dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 4.5
Tanggapan Responden Terhadap Indikator Rencana Strategis/Renstra

No	Pernyataan	Kriteria Jawaban	Bobot	Jumlah Orang	(%)	Skor	Rata-Rata	Kriteria
1	Visi dan misi program instansi tempat saya bekerja telah ditetapkan sesuai rencana strategik organisasi	Sangat Setuju	5	14	43.75	70	4.44	Sangat Baik
		Setuju	4	18	56.25	72		
		Netral	3	0	0.00	0		
		Tidak Setuju	2	0	0	0		
		Sangat Tidak Setuju	1	0	0	0		
		Jumlah		32	100	142		
2	Pada Instansi tempat saya bekerja telah menetapkan indikator kinerja untuk setiap kegiatan atau program yang akan dilaksanakan	Sangat Setuju	5	5	15.63	25	4.16	Baik
		Setuju	4	27	84.38	108		
		Netral	3	0	0.00	0		
		Tidak Setuju	2	0	0.00	0		
		Sangat Tidak Setuju	1	0	0	0		
		Jumlah		32	100	133		
Rata-rata Indikator Rencana Strategis							4.30	Sangat Baik

Sumber: Data olahan, 2020

Berdasarkan tabel 4.5 memperlihatkan nilai rata-rata indikator rencana strategis sebesar 4,30 berkriteria sangat baik. Hal ini bermakna bahwa visi dan misi program instansi tempat saya bekerja telah ditetapkan sesuai rencana strategik organisasi dan pada instansi tempat saya bekerja telah menetapkan indikator kinerja untuk setiap kegiatan atau program yang akan dilaksanakan secara baik.

Tabel 4.6
Tanggapan Responden Terhadap Indikator Rencana Kerja

No	Pernyataan	Kriteria Jawaban	Bobot	Jumlah Orang	(%)	Skor	Rata-Rata	Kriteria
1	Kegiatan atau program yang tertuang di dalam rencana kerja telah diakomodir ke dalam rencana kerja dan anggaran	Sangat Setuju	5	3	9.38	15	4.09	Baik
		Setuju	4	29	90.63	116		
		Netral	3	0	0.00	0		
		Tidak Setuju	2	0	0	0		
		Sangat Tidak Setuju	1	0	0	0		
		Jumlah		32	100	131		
2	Pada instansi tempat saya bekerja, kejelasan sasaran anggaran suatu program telah dimengerti oleh semua aparat dan pemimpin	Sangat Setuju	5	3	9.38	15	4.09	Baik
		Setuju	4	29	90.63	116		
		Netral	3	0	0.00	0		
		Tidak Setuju	2	0	0.00	0		
		Sangat Tidak Setuju	1	0	0	0		
		Jumlah		32	100	131		
Rata-rata Indikator Rencana Kerja							4.09	Baik

Sumber: Data Olahan, 2020

Berdasarkan tabel 4.6 memperlihatkan nilai rata-rata indikator rencana kerja sebesar 4,09 berkriteria baik. Hal ini bermakna bahwa kegiatan atau program yang tertuang di dalam rencana kerja telah diakomodir ke dalam rencana kerja dan

anggaran dan pada instansi tempat saya bekerja, kejelasan sasaran anggaran suatu program telah dimengerti oleh semua aparat dan pemimpin secara baik.

Tabel 4.7
Tanggapan Responden Terhadap Indikator Pengukuran Kinerja

No	Pernyataan	Kriteria Jawaban	Bobot	Jumlah Orang	(%)	Skor	Rata-Rata	Kriteria
1	Pada Instansi tempat saya bekerja, pelaksanaan kegiatan telah dikontrol dengan ukuran atau indikator kinerja yang jelas untuk menilai tingkat keberhasilan suatu kegiatan suatu program	Sangat Setuju	5	3	9.38	15	4.09	Baik
		Setuju	4	29	90.63	116		
		Netral	3	0	0.00	0		
		Tidak Setuju	2	0	0	0		
		Sangat Tidak Setuju	1	0	0	0		
		Jumlah		32	100	131		
2	Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) digunakan sebagai bahan pertimbangan dalam pengambilan keputusan dan merencanakan program atau kegiatan selanjutnya	Sangat Setuju	5	6	18.75	30	4.19	Baik
		Setuju	4	26	81.25	104		
		Netral	3	0	0.00	0		
		Tidak Setuju	2	0	0.00	0		
		Sangat Tidak Setuju	1	0	0	0		
		Jumlah		32	100	134		
Rata-rata Indikator Pengukuran Kinerja							4.14	Baik

Sumber: Data Olahan, 2020

Berdasarkan tabel 4.7 memperlihatkan nilai rata-rata indikator pengukuran kinerja sebesar 4,14 berkriteria baik. Hal ini bermakna bahwa pada instansi tempat saya bekerja, pelaksanaan kegiatan telah dikontrol dengan ukuran atau indikator kinerja yang jelas untuk menilai tingkat keberhasilan suatu kegiatan atau program dan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) digunakan sebagai bahan pertimbangan dalam pengambilan keputusan dan merencanakan program atau kegiatan selanjutnya secara baik.

Tabel 4.8
Tanggapan Responden Terhadap Indikator Evaluasi Kinerja

No	Pernyataan	Kriteria Jawaban	Bobot	Jumlah Orang	(%)	Skor	Rata-Rata	Kriteria
1	Adanya evaluasi ekonomi, efisien dan efektivitas apakah kegiatan atau program telah sesuai dengan target yang ditetapkan	Sangat Setuju	5	6	18.75	30	4.19	Baik
		Setuju	4	26	81.25	104		
		Netral	3	0	0.00	0		
		Tidak Setuju	2	0	0	0		
		Sangat Tidak Setuju	1	0	0	0		
		Jumlah		32	100	134		
2	Dalam mengevaluasi kinerja dilakukan dengan membandingkan target dengan realisasi sesungguhnya	Sangat Setuju	5	5	15.63	25	4.16	Baik
		Setuju	4	27	84.38	108		
		Netral	3	0	0.00	0		
		Tidak Setuju	2	0	0.00	0		
		Sangat Tidak Setuju	1	0	0	0		
		Jumlah		32	100	133		
Rata-rata Indikator Evaluasi Kinerja							4.17	Baik

Sumber: Data Olahan, 2020

Berdasarkan tabel 4.8 memperlihatkan nilai rata-rata indikator evaluasi kinerja sebesar 4,17 berkriteria baik. Hal ini bermakna bahwa adanya evaluasi ekonomi, efisien dan efektivitas apakah kegiatan atau program telah sesuai dengan target yang ditetapkan dan dalam mengevaluasi kinerja dilakukan dengan membandingkan target dengan realisasi sesungguhnya secara baik.

Tabel 4.9
Tanggapan Responden Terhadap Indikator Analisis akuntabilitas Kinerja

No	Pernyataan	Kriteria Jawaban	Bobot	Jumlah Orang	(%)	Skor	Rata-Rata	Kriteria
1	Pimpinan dan pegawai mempertanggungjawabkan (<i>accountable</i>) hasil dari suatu program atau kegiatan yang telah dilakukan	Sangat Setuju	5	6	18.75	30	4.19	Baik
		Setuju	4	26	81.25	104		
		Netral	3	0	0.00	0		
		Tidak Setuju	2	0	0	0		
		Sangat Tidak Setuju	1	0	0	0		
		Jumlah		32	100	134		
2	Instansi tempat saya bekerja telah menyusun Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku	Sangat Setuju	5	9	28.13	45	4.28	Sangat Baik
		Setuju	4	23	71.88	92		
		Netral	3	0	0.00	0		
		Tidak Setuju	2	0	0.00	0		
		Sangat Tidak Setuju	1	0	0	0		
		Jumlah		32	100	137		
Rata-rata Indikator Analisis Akuntabilitas Kinerja							4.23	Sangat Baik

Sumber: Data Olahan, 2020

Berdasarkan tabel 4.9 memperlihatkan nilai rata-rata indikator analisis akuntabilitas kinerja sebesar 4,23 berkriteria sangat baik. Hal ini bermakna bahwa pimpinan dan pegawai mempertanggungjawabkan (*accountable*) hasil dari suatu

program atau kegiatan yang telah dilakukan dan instansi tempat saya bekerja telah menyusun Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku secara sangat baik.

4.2.2.2 Tanggapan Responden Terhadap Variabel *Good Governance* (Y)

Variabel *Good Governance* memiliki empat indikator, setiap indikator memiliki dua pernyataan. Sehingga total keseluruhan pernyataan pada variabel *Good Governance* ada delapan pernyataan. Adapun rekapitulasi hasil jawaban responden dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 4.10
Tanggapan Responden Terhadap Indikator Akuntabilitas

No	Pernyataan	Kriteria Jawaban	Bobot	Jumlah Orang	(%)	Skor	Rata-Rata	Kriteria
1	Adanya kejelasan antara saran dan tujuan dari suatu program atau kegiatan yang akan dan sedang dilaksanakan	Sangat Setuju	5	17	53.13	85	4.53	Sangat Baik
		Setuju	4	15	46.88	60		
		Netral	3	0	0.00	0		
		Tidak Setuju	2	0	0	0		
		Sangat Tidak Setuju	1	0	0	0		
Jumlah				32	100	145		
2	Telah mengetahui secara jelas tugas, fungsi dan wewenang sebagai pegawai	Sangat Setuju	5	13	40.63	65	4.41	Sangat Baik
		Setuju	4	19	59.38	76		
		Netral	3	0	0.00	0		
		Tidak Setuju	2	0	0.00	0		
		Sangat Tidak Setuju	1	0	0	0		
Jumlah				32	100	141		
Rata-rata Indikator Akuntabilitas							4.47	Sangat Baik

Sumber: Data Olahan, 2020

Berdasarkan tabel 4.10 memperlihatkan nilai rata-rata indikator akuntabilitas sebesar 4,47 berkriteria sangat baik. Hal ini bermakna bahwa adanya kejelasan antara sasaran dan tujuan dari suatu program atau kegiatan yang akan dan sedang dilaksanakan dan telah mengetahui secara jelas tugas, fungsi dan wewenang sebagai pegawai sangat baik.

Tabel 4.11
Tanggapan Responden Terhadap Indikator Transparansi

No	Pernyataan	Kriteria Jawaban	Bobot	Jumlah Orang	(%)	Skor	Rata-Rata	Kriteria
1	Setiap selesainya kegiatan atau program perlu dibuat laporan ke atas dan dipublikasikan	Sangat Setuju	5	13	40.63	65	4.41	Sangat Baik
		Setuju	4	19	59.38	76		
		Netral	3	0	0.00	0		
		Tidak Setuju	2	0	0	0		
		Sangat Tidak Setuju	1	0	0	0		
		Jumlah		32	100	141		
2	Adanya pemberitahuan tentang laporan realisasi anggaran, laporan neraca, pelaporan arus kas dan laporan catatan atas keuangan kepada masyarakat dengan dimuat di media publikasi yang dapat dengan mudah diakses oleh masyarakat	Sangat Setuju	5	17	53.13	85	4.53	Sangat Baik
		Setuju	4	15	46.88	60		
		Netral	3	0	0.00	0		
		Tidak Setuju	2	0	0.00	0		
		Sangat Tidak Setuju	1	0	0	0		
		Jumlah		32	100	145		
Rata-rata Indikator Transparansi							4.47	Sangat Baik

Sumber: Data Olahan, 2020

Berdasarkan tabel 4.11 memperlihatkan nilai rata-rata indikator transparansi sebesar 4,47 berkriteria sangat baik. Hal ini bermakna bahwa setiap selesainya kegiatan atau program perlu dibuat laporan ke atas dan dipublikasikan dan adanya pemberitahuan tentang laporan realisasi anggaran, laporan neraca, laporan arus kas dan laporan catatan atas keuangan kepada masyarakat dengan di muat di media publikasi yang dapat dengan mudah diakses oleh masyarakat sangat baik.

Tabel 4.12
Tanggapan Responden Terhadap Indikator Keterbukaan

No	Pernyataan	Kriteria Jawaban	Bobot	Jumlah Orang	(%)	Skor	Rata-Rata	Kriteria
1	Adanya keterbukaan pemerintah akan menciptakan tata pemerintahan yang baik	Sangat Setuju	5	12	37.50	60	4.38	Sangat Baik
		Setuju	4	20	62.50	80		
		Netral	3	0	0.00	0		
		Tidak Setuju	2	0	0	0		
		Sangat Tidak Setuju	1	0	0	0		
Jumlah			32	100	140			
2	Adanya keterlibatan masyarakat dalam pembuatan keputusan dapat menciptakan tata pemerintahan yang baik	Sangat Setuju	5	23	71.88	115	4.72	Sangat Baik
		Setuju	4	9	28.13	36		
		Netral	3	0	0.00	0		
		Tidak Setuju	2	0	0.00	0		
		Sangat Tidak Setuju	1	0	0	0		
Jumlah			32	100	151			
Rata-rata Indikator Keterbukaan							4.55	Sangat Baik

Sumber: Data Olahan, 2020

Berdasarkan tabel 4.12 memperlihatkan nilai rata-rata indikator keterbukaan sebesar 4,55 ber kriteria sangat baik. Hal ini bermakna bahwa adanya keterbukaan pemerintah dapat menciptakan tata pemerintahan yang baik dan adanya keterlibatan masyarakat dalam pembuatan keputusan dapat menciptakan tata pemerintahan yang baik.

Tabel 4.13
Tanggapan Responden Terhadap Indikator Aturan Hukum

No	Pernyataan	Kriteria Jawaban	Bobot	Jumlah Orang	(%)	Skor	Rata-Rata	Kriteria
1	Dalam pelaksanaan akuntabilitas publik, instansi tempat saya bekerja telah mentaati hukum dan peraturan perundang-undangan	Sangat Setuju	5	19	59.38	95	4.59	Sangat Baik
		Setuju	4	13	40.63	52		
		Netral	3	0	0.00	0		
		Tidak Setuju	2	0	0	0		
		Sangat Tidak Setuju	1	0	0	0		
Jumlah			32	100	147			
2	Adanya kerangka hukum yang kuat merupakan ciri dari pemerintahan yang baik (<i>good governance</i>)	Sangat Setuju	5	23	71.88	115	4.72	Sangat Baik
		Setuju	4	9	28.13	36		
		Netral	3	0	0.00	0		
		Tidak Setuju	2	0	0.00	0		
		Sangat Tidak Setuju	1	0	0	0		
Jumlah			32	100	151			
Rata-rata Indikator Aturan Hukum							4.66	Sangat Baik

Sumber: Data Olahan, 2020

Berdasarkan tabel 4.13 memperlihatkan nilai rata-rata indikator aturan hukum sebesar 4,66 ber kriteria sangat baik. Hal ini bermakna bahwa dalam pelaksanaan akuntabilitas publik, instansi tempat saya bekerja telah mentaati

hukum dan peraturan perundang – undangan dan adanya kerangka hukum yang kuat merupakan ciri-ciri dari pemerintahan yang baik (*good governance*).

4.2.2.3 Rekapitulasi Tanggapan Responden

4.2.2.3.1 Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP)

Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah suatu rangkaian atau prosedur yang digunakan untuk menciptakan tata kelola pemerintahan yang baik dimana sistem ini merupakan integrasi dari sistem pelaporan kinerja yang selaras dengan pelaksanaan sistem akuntabilitas keuangan. Untuk mengetahui bagaimana rekapitulasi tanggapan responden mengenai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) pada Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Riau, dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 4.14
Rekapitulasi Hasil Tanggapan Responden Terhadap Variabel Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) Pada Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Riau

No	Indikator	Rata-rata	Kategori
1	Rencana Strategis	4.30	Sangat Baik
2	Rencana Kerja	4.09	Baik
3	Pengukuran Kinerja	4.14	Baik
4	Evaluasi Kinerja	4.17	Baik
5	Analisis Akuntabilitas Kinerja	4.23	Sangat Baik
Rata-rata Variabel sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah (SAKIP)		4.19	Baik

Sumber: Data Olahan, 2020

Berdasarkan tabel 4.14 dapat dilihat bahwa indikator Evaluasi Kinerja memiliki rata – rata terendah yaitu sebesar 4,17 dan indikator rencana strategis memiliki rata – rata tertinggi yaitu sebesar 4,30 sehingga di dapat rata – rata

variabel sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah dari keseluruhan indikator yaitu sebesar 4,19 dengan kategori baik.

4.2.2.3.2 *Good Governance*

Good Governance merupakan penyelenggaraan manajemen pembangunan bertanggung jawab dan digunakan untuk menghindari salah alokasi dana dan investasi serta menghindari adanya kolusi, kolusi dan nepotisme (KKN). Untuk mengetahui bagaimana rekapitulasi tanggapan responden mengenai *good governance* pada Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Riau, dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 4.15
Rekapitulasi Hasil Tanggapan Responden Terhadap Variabel *Good Governance* pada Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Riau

No	Indikator	Rata-rata	Kategori
1	Akuntabilitas	4.47	Sangat Baik
2	Transparansi	4.47	Sangat Baik
3	Keterbukaan	4.55	Sangat Baik
4	Aturan Hukum	4.66	Sangat Baik
Rata-rata Variabel <i>Good Governance</i>		4.54	Sangat Baik

Sumber: Data Olahan, 2020

Berdasarkan tabel 4.15 dapat dilihat bahwa indikator Akuntabilitas dan Transparansi memiliki nilai terendah yaitu sebesar 4,47 dan indikator Aturan Hukum memiliki rata – rata tertinggi yaitu 4,66 sehingga di dapat rata – rata variabel *Good Governance* dari keseluruhan indikator yaitu sebesar 4,54 dengan kategori sangat baik.

4.2.3 Hasil Pengujian

4.2.3.1 Uji validitas

Uji validitas dilakukan untuk mengukur sah atau tidaknya indikator atau kuesioner dari masing – masing variabel. Pengujian validitas dilakukan dengan bantuan SPSS versi 2.0 dengan metode analisis *corrected item-total correlation*, pengujian suatu data dapat dikatakan valid apabila $\text{Sig hitung} < \text{Sig } 0,05$. Dengan rumus $(df) = n - 2 = 32 - 2 = 30$, sehingga di dapat r tabel untuk df dengan 30 dengan 0,05 adalah 0,3494.

Berikut ini tabel hasil validitas terhadap variabel Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) (X) :

Tabel 4.16
Hasil Perhitungan Validitas Variabel Sistem Akuntabilitas
Kinerja Instansi Pemerintah (X)

Item Pernyataan	<i>corrected item-total correlation</i>	n	r _{tabel}	Keterangan
Pernyataan 1	0,587	32	0,3494	Valid
Pernyataan 2	0,947	32	0,3494	Valid
Pernyataan 3	0,752	32	0,3494	Valid
Pernyataan 4	0,752	32	0,3494	Valid
Pernyataan 5	0,752	32	0,3494	Valid
Pernyataan 6	0,947	32	0,3494	Valid
Pernyataan 7	0,947	32	0,3494	Valid
Pernyataan 8	0,947	32	0,3494	Valid
Pernyataan 9	0,947	32	0,3494	Valid
Pernyataan 10	0,751	32	0,3494	Valid

Sumber : Data Olahan SPSS 2.0, 2020

Dari tabel 4.16 diperoleh hasil ke-10 item pernyataan pembentuk variabel sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah sebagai variabel X dengan nilai *corrected item-total correlation* lebih besar dari nilai r_{tabel} yaitu 0,3494. Dapat disimpulkan bahwa item dari data tersebut seluruhnya sudah dinyatakan valid. Untuk selanjutnya dapat dilakukan proses reliabilitas.

Selanjutnya adalah uji validitas terhadap variabel Variabel *Good Governance* (Y) adalah sebagai berikut :

Tabel 4.17
Hasil Perhitungan Validitas Variabel *Good Governance* (Y)

Item Pernyataan	<i>corrected item-total correlation</i>	n	r_{tabel}	Keterangan
Pernyataan 1	0,836	32	0,3494	Valid
Pernyataan 2	0,886	32	0,3494	Valid
Pernyataan 3	0,886	32	0,3494	Valid
Pernyataan 4	0,836	32	0,3494	Valid
Pernyataan 5	0,886	32	0,3494	Valid
Pernyataan 6	0,755	32	0,3494	Valid
Pernyataan 7	0,693	32	0,3494	Valid
Pernyataan 8	0,755	32	0,3494	Valid

Sumber : Data Olahan SPSS 2.0, 2020

Dari tabel 4.17 diperoleh hasil ke-8 item pernyataan pembentuk variabel *good governance* (Y) dengan nilai *corrected item-total correlation* lebih besar dari nilai r_{tabel} yaitu 0,3494. Dapat disimpulkan bahwa item dari data tersebut seluruhnya sudah dinyatakan valid. Untuk selanjutnya dapat dilakukan proses reliabilitas.

4.2.3.2 Uji Reliabilitas

Metode pengujian reliabilitas yang digunakan peneliti adalah metode *Cronbach's Alpha* karena metode ini sangat cocok digunakan pada skor berbentuk skala. Batasan minimal metode *Cronbach's Alpha* adalah 0,60 dimana semakin besar koefisien reliabilitasnya maka semakin reliable suatu instrumen. Pengujian penghitungan uji reliabilitas ini menggunakan SPSS versi 2.0 dan berikut tabel uji reliabilitas.

Tabel 4.18
Hasil Perhitungan Reliabilitas Instrumen Penelitian

Variabel	Cronbach's Alpha	Standar Reliabilitas	Keterangan
Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP)	0,958	0,60	Reliabel
Penerapan <i>Good Governance</i>	0,950	0,60	Reliabel

Sumber : Data Olahan SPSS 2.0, 2020

Dari tabel 4.18 dapat dilihat bahwa masing – masing variabel memiliki nilai Croanbach's Alpha diatas 0,60 yang berarti dapat dikatakan bahwa data yang ada dari keseluruhan variabel adalah reliabel, maka data tersebut layak dipakai untuk pengambilan data penelitian.

4.2.3.3 Uji Normalitas Data

Uji normalitas bertujuan untuk menilai sebaran data pada sebuah kelompok ata atau variabel, apakah sebaran data tersebut berdistribusi normal ataukah tidak. Pengujian dengan menggunakan uji statistik *One Sample Kolmogorov-Smirnov Test* (K-S). Jika nilai probabilitas signifikan K-S lebih besar dari 0.05, maka data berdistribusi normal.

Tabel 4.19
Hasil Uji Normalitas Data

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test		Unstandardized Residual
N		32
Normal Parameters ^{a,b}	Mean	,0000000
	Std. Deviation	2,77012605
Most Extreme Differences	Absolute	,211
	Positive	,211
	Negative	-,156
Kolmogorov-Smirnov Z		1,193
Asymp. Sig. (2-tailed)		,116
a. Test distribution is Normal.		
b. Calculated from data.		

Sumber : Data Olahan SPSS 2.0, 2020

Dari tabel 4.19 dapat dilihat bahwa hasil uji normalitas data menunjukkan bahwa nilai signifikansi pengujian *Kolmogrov-Smirnov* sebesar $0,116 > 0,05$ berdistribusi normal maka data tersebut dapat digunakan untuk penelitian lebih lanjut.

4.2.3.4 Teknik Analisis Data

Metode analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis regresi linier sederhana. Data hasil tanggapan responden mengenai variabel sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah terhadap variabel penerapan *good governance* kemudian di distribusikan ke dalam program spss versi 20 untuk mengetahui bagaimana hubungan variabel tersebut. Berikut ini adalah hasil perhitungan analisis regresi linier sederhana sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah terhadap penerapan *good governance* pada badan pengelola keuangan dan asset daerah provinsi riau :

Tabel 4.20
Analisis Regresi Linier Sederhana

Coefficients ^a				
Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients
		B	Std. Error	Beta
1	(Constant)	11,800	6,401	
	SAKIP	,584	,152	,574

a. Dependent Variable: Good Governance

Sumber : Data Olahan SPSS 2.0, 2020

Dari tabel 4.20 maka persamaan regresi linier sederhana dalam penelitian ini adalah :

$$Y = a + bX$$

$$Y = 11,800 + 0,584X$$

Persamaan regresi linier sederhana di atas dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Nilai Konstanta (a) sebesar 11,800 yang berarti apabila sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah (SAKIP) nilainya adalah nol, maka penerapan *good governance* nilainya adalah 11,800 satuan.
2. Nilai koefisien regresi variabel sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah (SAKIP) sebesar 0,584 yang berarti jika sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah (SAKIP) mengalami kenaikan satu satuan, maka penerapan *good governance* akan mengalami kenaikan sebesar 0,584 satuan.

4.2.3.5 Pengujian Hipotesis

4.2.3.5.1 Pengujian Secara Parsial (Uji t)

Tujuan dari uji parsial adalah untuk mengetahui seberapa jauh pengaruh dari variabel independen (X) terhadap variabel dependen (Y) secara parsial. Pengujian hipotesis dilakukan dengan membandingkan nilai t_{hitung} dengan t_{tabel} pada alpha 5% (0,05) dengan *degree of freedom* (df) = $t(a / 2 ; n - k - 1 = t(0,025 ; 30) = 2,04227$.

Tabel 4.21
Analisis uji t

Coefficients ^a					
Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
1					
(Constant)	11.800	6,401		1,844	,075
SAKIP	,584	,152	,574	3,841	,001

a. Dependent Variable: Good Governance

Sumber : Data Olahan SPSS 2.0, 2020

Syarat : $t_{hitung} > t_{tabel}$ signifikan 0,05

Berdasarkan hasil output menggunakan uji statistik t pada tabel 4.21 diatas diperoleh t_{hitung} sebesar $3,841 > t_{tabel}$ $2,04227$ dan nilai signifikan $0,001 < 0,05$, maka hal ini menunjukkan bahwa secara parsial sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah (SAKIP) berpengaruh signifikan terhadap penerapan *good governance* pada badan pengelola keuangan dan aset daerah provinsi riau.

4.2.3.6 Koefisien Determinasi (R^2)

Nilai koefisien determinasi adalah antara nol dan satu. Nilai R^2 yang kecil berarti kemampuan variabel-variabel independen dalam menjelaskan variasi variabel dependen amat terbatas. Jika R^2 semakin besar atau mendekati 1, maka model sudah tepat. Untuk data survei yang bersifat *cross section* data yang diperoleh dari responden pada waktu yang sama, maka R^2 0,2 atau 0,3 sudah cukup baik.

Tabel 4.22
Hasil Uji Koefisien Determinasi

Model Summary				
Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	,574 ^a	,330	,307	2,816
a. Predictors: (Constant), SAKIP				

Sumber : Data Olahan SPSS 2.0, 2020

Dari tabel 4.22 dapat dilihat bahwa nilai koefisien determinasi (*R Square*) sebesar 0,330 artinya 33% variabel *good governance* dijelaskan oleh variabel implementasi sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah (SAKIP), sedangkan 67% dijelaskan oleh variabel - variabel lainnya yang tidak dimasukkan kedalam penelitian ini.

4.2.4 Pembahasan Hasil Penelitian

4.2.4.1 Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP)

Berdasarkan hasil rekapitulasi tanggapan responden mengenai pernyataan-pernyataan yang diberikan peneliti kepada responden melalui kuesioner untuk mendapatkan gambaran mengenai implementasi sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah (SAKIP) pada Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Riau, maka hasil tersebut menunjukkan bahwa implementasi sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah pada Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Riau berkriteria baik dengan rata-rata indikator sebesar 4,19. Jadi, dapat disimpulkan bahwa implementasi sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah pada Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Riau telah dilaksanakan secara baik, tetapi belum dilakukan secara optimal sehingga masih bisa untuk lebih ditingkatkan lagi.

4.2.4.2 Penerapan *Good Governance*

Berdasarkan hasil rekapitulasi tanggapan responden mengenai pernyataan-pernyataan yang diberikan peneliti kepada responden melalui penyebaran kuesioner untuk mendapatkan gambaran mengenai penerapan *good governance* pada Badan Pengelola keuangan dan Aset Daerah Provinsi Riau, maka hasil tersebut menunjukkan bahwa penerapan *good governance* pada Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Riau berkriteria sangat baik dengan rata-rata indikator sebesar 4,54. Hal ini sejalan dengan penilaian yang diberikan oleh Badan Pemeriksa Keuangan Perwakilan Provinsi Riau yang

memberikan opini wajar. Sumber: Opini LKPD Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Riau Tahun 2018.

Jadi, dapat disimpulkan bahwa penerapan *good governance* pada Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Riau telah dilaksanakan dengan sangat baik, namun belum dilakukan secara optimal sehingga masih bisa untuk lebih ditingkatkan lagi.

4.2.4.3 Pengaruh Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) terhadap Penerapan *Good Governance*

Pada penelitian ini menunjukkan bahwa sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah dan *good governance* sesuai dengan regresi linier sederhana yakni $Y = 11,800 + 0,584X$. Dari analisis tersebut dapat diketahui bahwa nilai a adalah 11,800. Nilai ini menunjukkan bahwa pada saat nilai sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah bernilai nol, maka *good governance* akan bernilai 11,800. Sedangkan nilai b pada X yaitu sebesar 0,584 menunjukkan bahwa ketika terjadi kenaikan sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah sebesar satu satuan, maka *good governance* akan meningkat sebesar 0,584 satuan.

Dari segi pengaruh terhadap variabel *good governance*, maka hasilnya akan menunjukkan hubungan positif dan signifikan sehingga dapat diartikan bahwa *good governance* yang baik dibentuk oleh variabel sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintahan yang baik pula, jika sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah lebih ditingkatkan lagi, maka akan meningkatkan *good governance* secara optimal.

Dari hasil uji determinasi adalah sebesar 0,330 artinya 33% variabel *good governance* (Y) dipengaruhi oleh sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah (SAKIP) (X), sedangkan 67% dipengaruhi oleh variabel lainnya yang tidak diteliti.

Hal ini sejalan dengan penelitian terdahulu yang menyatakan bahwa sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah berpengaruh terhadap *good governance*, sesuai dengan penelitian Jajang Badruzaman dan Irna Chairunnisa (2012) dengan judul “Pengaruh Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) Terhadap Penerapan *Good Governance* Pada 14 Dinas Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Ciamis” hasil penelitian menunjukkan bahwa Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) dan Penerapan *Good Governance* memiliki hubungan kuat, berdasarkan perhitungan koefisien determinasi diketahui bahwa 61% dari penerapan *good governance* di pengaruhi oleh implementasi SAKIP. Dan juga sejalan dengan penelitian terdahulu oleh Ati Rosliyati (2014) Jurnal JAWARA, dengan judul “Pengaruh Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) Terhadap Penerapan *Good Governance* Pada BKPLD Kabupaten Tasikmalaya” hasil penelitian menunjukkan bahwa sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah (SAKIP) berpengaruh signifikan dan berdasarkan perhitungan koefisien determinasi sebesar 39,3%.

BAB V SIMPULAN DAN SARAN

5.1 Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, maka dapat disimpulkan beberapa hal sebagai berikut :

1. Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) pada Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Riau termasuk dalam klasifikasi baik dengan nilai rata – rata 4,19. Penilaian tersebut diukur dengan menggunakan indikator Rencana Strategis, Rencana Kerja, Pengukuran Kinerja, Evaluasi Kinerja dan Analisis Akuntabilitas Kinerja.
2. Penerapan *Good Governance* pada Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Riau termasuk dalam klasifikasi sangat baik dengan nilai rata – rata 4,54. Penilaian diukur dengan menggunakan indikator Akuntabilitas, Transparansi, Keterbukaan dan Aturan Hukum.
3. Impelentasi sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah (SAKIP) berpengaruh signifikan terhadap penerapan *good governance* pada Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Riau.

5.2 Saran

Berdasarkan kesimpulan diatas, dapat diberikan saran sebagai berikut :

1. Untuk Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Riau agar lebih meningkatkan lagi dalam penerapan sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah dalam menciptakan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*).

2. Untuk Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Riau agar lebih mempublikasikan dokumen sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah lebih lengkap agar lebih mudah diakses oleh masyarakat.
3. Pada penelitian selanjutnya diharapkan agar menambah variabel penelitian lainnya sehingga mendapatkan hasil yang lebih komprehensif.



Dokumen ini adalah Arsip Miik :

Perpustakaan Universitas Islam Riau

DAFTAR PUSTAKA

- Aprilya, Cici. 2015. *Pengaruh Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Pengelolaan Keuangan Daerah Terhadap Good Government Governance studi pada SKPD Kabupaten Rokan Hulu*, skripsi. Universitas Islam Riau.
- Asmawi, Rewansyah. 2010. *Reformasi Birokrasi Dalam Rangka Good Governance*. Jakarta: Yusaintanas.
- Badruzaman, jajang dan irna chairunnisa. 2012. *Pengaruh impelementasi sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah (sakip) terhadap penerapan good governance pada Dinas Daerah Kabupaten Ciamis*, Jurnal Akuntansi Volume 7, No. 1. Universitas Siliwangi Tasikmalaya.
- Ghozali, Imam. 2011. *Aplikasi Analisis Multivariate Dengan Program SPSS*. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Ghozali, Imam. 2013. *Alikasi Analisis Multivariate Dengan Program IBM SPSS 21 Update PLS Regresi*. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Hardiwinoto (2017, 2 Desember). *Good Government Governance*. Diperoleh 15 Januari 2019, <https://hardiwinoto.com/good-government-governance>.
- Mahendra, A. D., & Woyanti, N. 2014. *Analisis Pengaruh Pendidikan, Upah, Jenis Kelamin, Usia dan Pengalaman Kerja Terhadap Produktivitas Tenaga Kerja (Studi di Industri Kecil Tempe di Kota Semarang)*. *Doctoral dissertation*, Fakultas Ekonomika dan Bisnis, Universitas Diponegoro.
- Pemerintah Provinsi Riau. 2018. *Rencana Kerja Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Riau Tahun 2018*. Riau. Pemerintah Provinsi Riau.
- Rewansyah, Asmawi. 2010. *Reformasi Birokrasi Dalam Rangka Good Governance*. Jakarta: Rizky Grafis.
- Ruspina, Depi Oktia. 2013. *Pengaruh kinerja aparatur pemerintah daerah, pengelolaan keuangan daerah, dan sistem pengendalian internal pemerintah (SPIP) terhadap penerapan good governance (studi empiris pada pemerintah kota padang)*, skripsi. Universitas Negeri Padang.
- Rosliyati, Ati. 2014. *Pengaruh Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) terhadap penerapan Good Governance pada BKPLD Kabupaten Tasikmalaya*, Jurnal Wawasan dan Riset Akuntansi Volume 1, No. 2. Universitas Galuh Ciamis.

- Tahir, Arifin. 2015. *Kebijakan Publik dan Transparansi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah*. Bandung: Alfabeta.
- Santoso, Djonet. 2019. *Admisnistrasi Publik: Sustainable Development Goals (SDGs)/ Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB)*. Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia.
- Sedarmayanti. 2009. *Reformasi Administrasi Publik, Reformasi Birokrasi, dan Kepemimpinan Masa Depan (Mewujudkan Pelayanan Prima dan Kepemerintahan Yang Baik)*. Bandung. Refika Aditama.
- Sugiyono. 2011. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Sugiyono. 2014. *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Sugiyono. 2016. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Sugiyono. 2017. *Metode Penelitian Kebijakan*. Bandung: Alfabeta.
- Sugiyono. 2018. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan Kombinasi*. Bandung: Alfabeta.
- Suharyandi dan Purwanto. 2013. *Statistika Untuk Ekonomi & Keuangan Modern*. Jakarta: Salemba Empat.
- Sujarweni, Wiratna. 2014. *SPSS Untuk Penelitian*. Yogyakarta: Pustaka Baru Press.
- Sujarweni, Wiratna. 2019. *Metodologi Penelitian*. Yogyakarta: Pustakabarupress.
- Suliyanto. 2011. *Ekonometrika Terapan : Teori & Aplikasi dengan SPSS*. Yogyakarta: Andi Offset.
- Suyono, Bambang dan Hermawan. 2013. *Analisis Faktor-faktor yang Mempengaruhi Produktivitas Tenaga Kerja pada Industri Kerajinan Kulit di Kabupaten Magetan*. Jurnal Ekomaks, Vol.2, No.2.
- Trijono, Rachmat. 2015. *Metodologi Penelitian Kuantitatif*. Jakarta: Papas Sinar Sinanti.

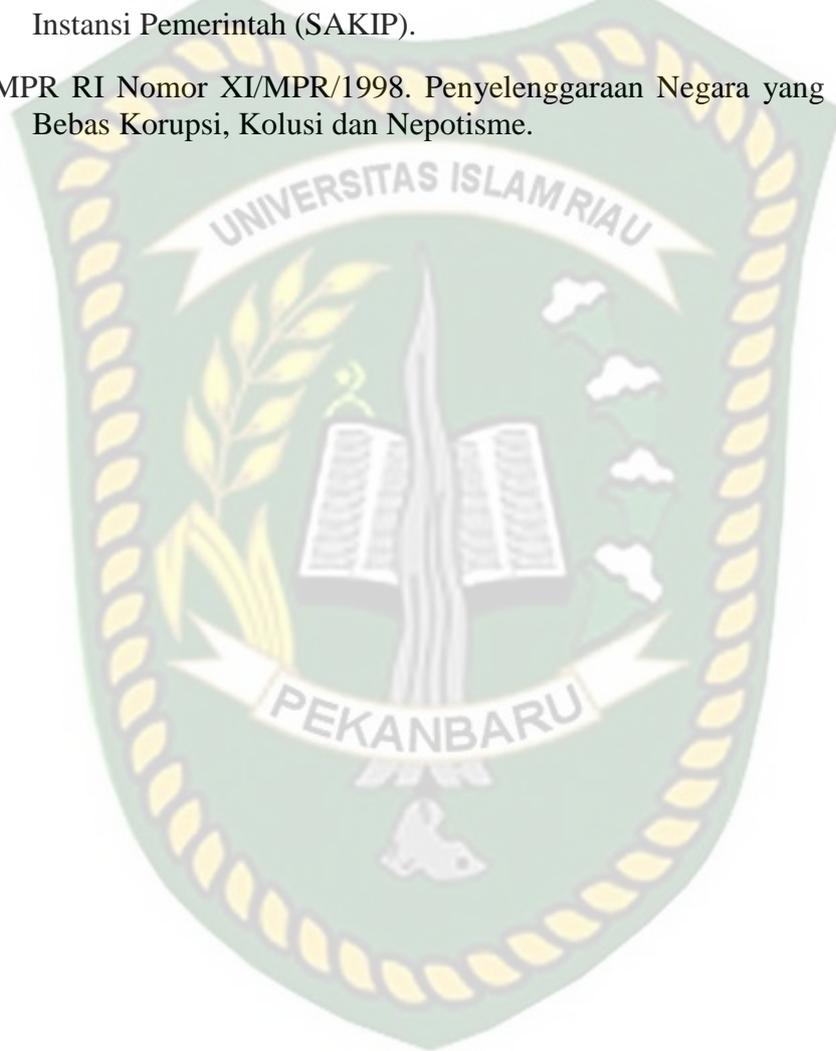
Peraturan dan Perundang-undangan

- Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

Keputusan Menteri Perdagangan Republik Indonesia, No. 1332/M-DAG/KEP/12/2010 tentang Pedoman Penyusunan Dokumen Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) di Lingkungan Kementerian Perdagangan.

Peraturan Presiden RI Nomor 29 Tahun 2014. Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP).

TAP MPR RI Nomor XI/MPR/1998. Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.



Dokumen ini adalah Arsip Miik :

Perpustakaan Universitas Islam Riau